

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Februari | Tahun 2023 No. 45

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



PKS

*Skor IPK Indonesia
2022 Anjlok*

Perlu Adanya Reformasi

*di Sektor
Pemberantasan
Korupsi!*





Catatan Dr. Salim

Indonesia adalah negara besar dalam seluruh aspek dan potensinya. Dimana potensi kebesaran Indonesia itu belum benar-benar aktual meski pemerintahan silih berganti. Sehingga kita belum juga beranjak atau tinggal landas dari negara berkembang menuju negara maju. Akibatnya, negara kita terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan dan problematika pembangunan yang harus diselesaikan bersama mulai dari persoalan ekonomi: pemenuhan kebutuhan pokok, kemiskinan, dan pengangguran; persoalan pemerataan pembangunan; persoalan keadilan ekonomi, politik, dan hukum; persoalan kualitas sumber daya manusia

dan pendidikan; persoalan jaminan sosial dan layanan kesehatan; hingga persoalan infrastruktur dasar bagi warga negara di berbagai wilayah.

Kebijakan yang tepat tersebut sudah barang tentu bukan kebijakan yang berpihak pada oligarki politik dan ekonomi karena sudah pasti kecenderungan ini malah semakin membuat ekonomi kita rapuh. Orientasi tersebut juga hanya akan membuat kepemimpinan nasional kita di berbagai level dan sektor menjadi lemah dalam melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat dan kepentingan nasional.

Oleh karena itu, kita bersama-sama masyarakat sipil dan elemen mahasiswa serta masyarakat luas memberikan catatan kritis hingga penolakan

terhadap sejumlah produk legislasi dan kebijakan pemerintah yang dalam penilaian kami lebih berpihak pada oligarki. Selain negativitas yang saya sebutkan di atas, oligarki jelas melemahkan semangat kolektivitas dan kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa dalam mewujudkan cita-cita bernegara. Orientasi tersebut juga berlawanan dengan semangat kolaborasi dalam melayani Indonesia.

Sebagai bagian dari bangsa yang majemuk dengan kesenjangan atau disparitas sosial ekonomi yang masih cukup tinggi kita harus pandai mengolah rasa kebangsaan: mengolah rasa keadilan, rasa memiliki, rasa kebersamaan, hingga rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama anak bangsa. Fokus kita hari ini adalah memperjuangkan rasa kebangsaan tersebut.

Realitas bangsa Indonesia yang majemuk atau berbhineka harus kita maknai anugerah Allah SWT. Bukan perbedaannya yang menjadi fokus kita tapi persatuan kita untuk mengokohkan ke-Indonesia-an. Bukan perbedaan yang terus kita bicarakan apalagi kita pertentangkan, tapi pemerataan pembangunan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka, sekali lagi, mengolah rasa itu penting.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia



Tumbuhkan semangat kebersamaan, semangat empati dan kepedulian, serta semangat solidaritas sosial dalam tubuh bangsa ini, insya

Allah rasa kebangsaan kita akan semakin kuat sekaligus menjadi modal dasar pembangunan yang berkeadilan.

Kolaborasi Melayani Indonesia (2)

Sebagai bagian dari bangsa yang majemuk dengan kesenjangan atau disparitas sosial ekonomi yang masih cukup tinggi kita harus pandai-pandai mengolah rasa kebangsaan: mengolah rasa keadilan, rasa memiliki, rasa kebersamaan, hingga rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama anak bangsa. Fokus kita hari ini adalah memperjuangkan rasa kebangsaan tersebut.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



The PKS Faction Loudly Speaks for Palestinian Independence at the OIC Parliamentary Forum

Aljazair (27/01) — Chairman of the PKS faction of the DPR, Jazuli Juwaini, intervened and expressed his opinion on Palestinian independence at the Forum of the Union of Parliaments of the Organizations of the Islamic Conference (PUIC) which was held in Algeria (Thursday, 26/1/2023).

Jazuli Juwaini emphasized that Indonesia's stance has never wavered in supporting Palestinian independence and bringing peace to the Palestinian nation.

"Indonesia supports 1000 percent, not just 100 percent, the struggle for Palestinian independence which was also voiced by the OIC Parliament. For us in Indonesia this is a constitutional mandate, a

historical debt and a humanitarian responsibility. Palestine is the only nation in the modern era that is still living under colonialism. It's really sad," said Jazuli.

This member of the Inter-Parliamentary Cooperation Agency hopes that the participating countries of the forum will take a more progressive humanitarian role and responsibility regarding this

issue through various available diplomatic channels so that the Palestinian issue becomes the world's collective consciousness. This problem is not only the problem of the Islamic world but the problem of humanity in the civilized world.

"As an example the efforts we have made in Indonesia, on behalf of the PKS Party and faction in parliament led directly by the party leadership, we carry out diplomacy for the humanitarian issue of Palestine by visiting the UN offices, UNHCR, UNESCO, to the Parliaments of European Countries and American Congress," he said.

We are here to bring a message of humanity and peace, continued Jazuli. Wars and conflicts must stop. The Palestinian people must live in peace and quiet in independence. No other nation may oppress and seize their land by force as Israel did. Likewise, wars and conflicts in any part of the world must end by bringing all parties to a dignified peace negotiation table. We are optimistic that the vision of world peace can be established on the world civilization that we have built together.

According to this Member of Commission I of The House of Representatives of the Republic of Indonesia, the consequences of war are death, displacement and desolation. And those who

suffer the most and become the saddest victims are only the elderly, women and children. Is this the future of the world we want to see? Certainly not!

"For this reason, through this Forum, let's declare louder

and louder: stop the Israeli occupation of Palestine! Stop the war. Stop the conflict. Let's organize a more orderly, peaceful and dignified world based on eternal peace and social justice," concluded Jazuli.



Indonesia supports 1000 percent, not just 100 percent, the struggle for Palestinian independence which was also voiced by the OIC Parliament. For us in Indonesia this is a constitutional mandate, a historical debt and a humanitarian responsibility. Palestine is the only nation in the modern era that is still living under colonialism. It's really sad

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Chairman of the PKS faction of the DPR



Turki Alami Gempa Hebat, Fraksi PKS Ajak Pemerintah dan Rakyat Indonesia Membantu

Jakarta (06/02) --- Gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 menerjang Gaziantep, wilayah tengah Turki pada Senin (6/2) menimbulkan ratusan korban jiwa dan kerusakan di banyak bangunan.

Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS Sukamta mengajak Pemerintah dan Rakyat Indonesia untuk membantu Turki.

"Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera turut berduka atas musibah gempa yang melanda Turki, semoga kerusakan dan dampak gempa lainnya bisa segera tertangani," ungkap Sukamta.

Anggota DPR RI Dapil DI Yogyakarta ini kemudian mengajak rakyat Indonesia untuk membantu Turki.

"Turki sedang berduka, mari kita bantu semaksimal mungkin rakyat Turki dalam menghadapi musibah ini. Turki adalah negara sahabat yang berulang kali membantu Indonesia. Terakhir Turki

membantu Indonesia dalam penanganan gempa Cianjur. Beberapa tahun lalu membantu dalam musibah gempa Palu. Ketika Tsunami Aceh Turki juga membantu Indonesia secara maksimal," jelas Sukamta.

"Pemerintah harapannya setelah memastikan kondisi dari WNI yang berada di Turki bisa mengkolaborasi berbagai pihak di Indonesia untuk membantu Turki dalam menangani musibah gempa ini."

Sampai saat ini diperkirakan lebih dari 100 orang meninggal dan ribuan bangunan hancur. Gempa dengan skala lebih dari 7 SR terjadi beberapa kali dalam waktu berdekatan.

Pemerintah harapannya setelah memastikan kondisi dari WNI yang berada di Turki bisa mengkolaborasi berbagai pihak di Indonesia untuk membantu Turki dalam menangani musibah gempa ini

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Wacana Presiden Tiga Periode, Aleg PKS: Bahaya bagi Demokrasi dan Desak Pemerintah Tolak dengan Tegas!

Jakarta (07/02) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi menegaskan kembali penolakannya kepada wacana tiga periode Presiden Joko Widodo.

Isu-isu yang kembali muncul di tengah persiapan menuju Pemilu 2024 diharapkan bisa diredakan dengan komunikasi yang baik dari pemerintah, tidak akan ada perpanjangan periode Presiden tanpa adanya pelanggaran terhadap konstitusi.

Teddy kecewa, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, wacana presiden 3 periode malah semakin menguat. Hal ini didasari pada banyaknya pendukung pada wacana ini, baik dari ketua umum partai politik sampai ke kelompok masyarakat.

“Dimulai dari tahun 2022 sampai tahun ini, rumor-rumor

terus muncul dan menguat. Dukungan-dukungan dari berbagai pihak seakan-akan malah dikumpulkan dan menjadi suara masyarakat banyak. Hal ini mengecewakan, karena seakan-akan pemerintah tidak konsisten pada yang dinyatakannya pada tahun lalu, untuk mencukupkan pada dua periode,” kata Anggota DPR RI Fraksi PKS ini.

Saat ini, masih ada wacana-wacana presiden 3 periode yang berhembus di masyarakat dan seakan dibiarkan. Hal ini meskipun dianggap hanya berasal dari kelompok simpatisan Joko

Widodo, tetapi tetap berbahaya.

“Masyarakat perlu untuk diberikan penjelasan yang tepat, bahwa konstitusi sudah jelas. Kita harus menentang wacana 3 periode ini. Bukan hanya demi konsistensi pada konstitusi yang sudah ada, tetapi juga untuk mempertahankan esensi demokrasi. Tanpa membatasi suara masyarakat, pendidikan politik yang perlu ditingkatkan agar semua tau aturannya, mencegah kekuasaan absolut,” ujar Anggota Komisi II DPR itu.

Menurut Teddy, Pemerintah memiliki beban untuk mempertahankan konstitusi dengan tegas terhadap wacana 3 periode. Presiden Jokowi telah berkali-kali menegaskan penolakannya, tetapi masih ada pembiaran tanpa ada pernyataan yang jelas dari pemerintah bahwa wacana ini berbahaya bagi demokrasi dan melanggar konstitusi.

“Konstitusi harus dijaga dengan ketegasan pemerintah. Tidak perlu koersif, hanya harus tegas pada kenyataan konstitusi tidak bisa ditabrak. Pemerintah harus memberikan pernyataan bahaya dan konsekuensi dari wacana ini, bukan dengan pernyataan pembiaran demi kebebasan berbicara,” ucap Teddy.

Teddy menilai segala rumor yang muncul sebaiknya segera ditepis oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo harus

konsisten. Dinamika yang terus bermunculan jangan memberikan ruang perubahan komitmen 2 periode Presiden Joko Widodo.

“Konsisten saja.

Penolakan dari Presiden Jokowi sebaiknya dikendalikan lagi.

Jangan ada ruang untuk perbedaan pendapat di internal pemerintah. Ruang ini mengacaukan konsistensi, dan malah mengencangkan rumor yang bermunculan,” tegas Teddy.



“Konstitusi harus dijaga dengan ketegasan pemerintah. Tidak perlu koersif, hanya harus tegas pada kenyataan konstitusi tidak bisa ditabrak. Pemerintah harus memberikan pernyataan bahaya dan konsekuensi dari wacana ini, bukan dengan pernyataan pembiaran demi kebebasan berbicara

TEDDY SETIADI, S.Sos.

Anggota Komisi II DPR RI



Soal Pencopotan Hakim Aswanto, Nasir Djamil: Bahayakan Masa Depan Integritas MK

Jakarta (29/01) --- Perihal MK yang diduga mengubah substansi putusan soal pencopotan hakim Aswanto,

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai perubahan redaksi dalam putusan MK tersebut sangat membahayakan masa depan dan integritas di tubuh MK dan berpotensi menjadikan MK sebagai 'alat' segelintir kelompok dalam memenuhi ambisi politiknya.

Nasir Djamil juga mendorong agar MK membentuk dewan etik untuk menelusuri perubahan redaksi sebagaimana yang terdapat dalam salinan putusan terkaitan pergantian Hakim MK Aswanto di tengah jalan.

Politisi PKS itu menduga perubahan redaksi meskipun terdiri hanya dua suku kata tapi berimplikasi terhadap duduk perkara yang dimohonkan oleh pemohon.

"Saya menduga ada kesengajaan terhadap perubahan itu redaksi dalam salinan putusan

itu. Tidak seperti biasanya, MK selalu cermat dan prudent dalam menyalin putusan hukumnya", ujar Nasir

Pembentukan Dewan Etik dalam pandangannya merupakan langkah awal untuk menjawab keragu-raguan publik soal adanya 'pat gulipat' perubahan redaksi dalam salinan tersebut. Pembentukan dewan itu diharapkan dapat menjaga kewibawaan MK dan hakimnya yang berpredikat negarawan.

"Lembaga yang diisi oleh negarawan itu ibarat lembaga yang diisi oleh manusia setengah dewa. Karena itu tidak boleh dianggap remeh soal yang kini telah menjadi perhatian publik. Semoga DPR dan Presiden mendorong upaya pembentukan dewan etik tersebut", pungkas Nasir Djamil

"Saya menduga ada kesengajaan terhadap perubahan itu redaksi dalam salinan putusan itu. Tidak seperti biasanya, MK selalu cermat dan prudent dalam menyalin putusan hukumnya"

H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI



Skor IPK Indonesia 2022 Anjlok, Fraksi PKS: Perlu Adanya Reformasi di Sektor Pemberantasan Korupsi!

Jakarta (07/02) - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap jatuhnya indeks korupsi di Indonesia selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Merujuk pada data Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar empat poin dari skor 38 pada 2021 menjadi 34. Penurunan ini menjadi sejarah buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan ini merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.

"Turunnya indeks persepsi korupsi di Indonesia menjadi suatu kekecewaan yang sangat besar bagi kami dan tentunya sudah seharusnya menjadi atensi besar bagi Pemerintahan Presiden Jokowi untuk dapat melakukan perbaikan secara keseluruhan terhadap sistem pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Adang.

Dengan turunnya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK ini, menempatkan Indonesia kini berada pada posisi 110 dari 180 negara di dunia. Data ini menunjukkan adanya suatu penurunan yang signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia.

"Turunnya skor IPK yang signifikan tentu menjadi alarm bagi tugas pemberantasan korupsi di negeri ini," ujar Adang.

Sebagai informasi, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia saat ini setara dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Malawi, Nepal, dan Gambia.

Bahkan di kawasan Asia Tenggara, indeks persepsi korupsi Indonesia jauh tertinggal dari Singapura (83), Malaysia (47), Vietnam (42), dan Thailand (36).

"Pembenaan dan reformasi besar-besaran perlu segera dilakukan oleh Presiden Jokowi pada sektor pemberantasan korupsi untuk dapat menaikkan kembali IPK Indonesia. Indonesia sebagai negara yang besar tentunya memerlukan sistem pemberantasan korupsi yang baik guna mencegah dan memberantas perilaku tersebut di negeri ini", pungkasnya.

"Pembenaan dan reformasi besar-besaran perlu segera dilakukan oleh Presiden Jokowi pada sektor pemberantasan korupsi untuk dapat menaikkan kembali IPK Indonesia. Indonesia sebagai negara yang besar tentunya memerlukan sistem pemberantasan korupsi yang baik guna mencegah dan memberantas perilaku tersebut di negeri ini",

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI



ONGKOS HAJI 2023 NAIK, JAMAAH BERAT!

Sebagian besar Jemaah Indonesia
kelas menengah bawah



*Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji)



Kematian Hasya Atallah Syahputra mengingatkan publik pada tewasnya George Floyd beberapa tahun lalu di Amerika. Hasya tewas dalam kecelakaan dan dijadikan tersangka oleh polisi Indonesia. Sementara George Floyd tewas disebabkan dicekik dengan lutut oleh polisi di Minneapolis US.

Demu besar-besaran terjadi dalam kasus George Floyd yang dikenal dengan jargon "black live matters".

Kampanye ini sebenarnya merupakan puncak dari berbagai kejadian ketidakadilan rasial yang dilakukan polisi dalam menangkap orang-orang berkulit hitam. Namun lebih jauh lagi, sejumlah pengamat menilai bahwa tuntutan "black live matters" pada dasarnya lahir dari rasa frustrasi dan kebuntuan pada ketimpangan sosial yang dialami oleh masyarakat kulit hitam di Amerika.

Sejumlah reformasi kepolisian kemudian dilakukan guna mengembalikan kepercayaan publik pada sistem ketertiban dan keamanan di Amerika Serikat.

Persoalan yang sedikit banyak sama juga terjadi pada kasus kematian Hasya di Indonesia. Seperti bola salju, perhatian publik semakin membesar dan boleh jadi melahirkan desakan reformasi kepolisian yang lebih besar. Terlebih lagi, narasi yang

berkembang dalam isu kematian Hasya sudah mengarah pada ketimpangan sosial antara kaum tak berdaya versus aparat yang berkuasa.

Frustrasi Publik

Rasa frustrasi publik pada kepolisian sebenarnya sedang memanans ditengah pengadilan Sambo. Ketidakpercayaan publik pada polisi pada kasus Sambo sebenarnya belum

benar-benar membuat gerakan besar disebabkan korban pembunuhannya adalah sama-sama polisi. Sehingga publik masih menganggap bahwa kasus Sambo hanyalah satu dari kekacauan elite kepolisian.

Namun berbeda dengan kasus Hasya, personalisasi kasus ini pada dasarnya mampu mengarahkan gerakan sosial yang lebih besar. Dalam kacamata publik, Hasya

merupakan sosok mahasiswa baik-baik dari universitas terbaik Indonesia.

Dalam sebuah kecelakaan, Hasya yang mengendarai motor, tewas setelah menabrak sebuah mobil yang dikendarai oleh purnawirawan Polisi. Pada 27 Januari 2023 Polisi kemudian menetapkan Hasya yang telah tewas menjadi tersangka. Lebih jauh kasus tersebut dihentikan dan tidak



Kepercayaan Publik dan Reformasi Kepolisian

**OLEH:
HABIB ABOE BAKAR
ALHABSYI**

Anggota Komisi III DPR RI

ada tindak lanjut pada proses hukum yang melibatkan purnawirawan Polisi tersebut.

Terlepas kesimpangsiuran realitas yang terjadi pada saat kecelakaan, namun penetapan tersangka tersebut telah melahirkan ketidakpercayaan publik yang semakin memuncak pada instansi kepolisian.

Rasa frustrasi publik terhadap keadilan yang disebabkan ketidakpercayaan

Kepercayaan Publik ... (2)

publik kepada institusi kepolisian merupakan hal yang berbahaya.

Menurut penelitian Andrew Goldsmith (2016), defisit kepercayaan pada kepolisian menunjukkan laju perkembangan sebuah negara. Menurutnya, defisit kepercayaan tersebut terjadi pada negara-negara dengan karakter otoritarianisme, pasca konflik dan terpecah belah.

Kondisi negara-negara pasca konflik, mencirikan respon warga negara dengan kepolisian sebagai sebuah kecemasan. Hal ini ditegaskan oleh Alemika (1999) yang mengkhhususkan bahwa polisi

dalam kondisi negara yang tidak sehat, cenderung lebih melahirkan rasa ketakutan daripada rasa aman, terutama bagi kelompok miskin dan tidak berdaya.

Pengalaman Kolektif

Kasus Hasya bisa menjadi salah satu pemicu dari berbagai trauma dari rasa frustrasi publik kepada polisi. Tidak sedikit dari masyarakat yang pernah mengalami defisit kepercayaan dalam berbagai kasus yang melibatkan polisi. Pengalaman kolektif inilah yang mungkin saja dapat bergulir menjadi sebuah gerakan besar sebagaimana gerakan “black

live matters” di Amerika.

Peran antagonis polisi, sebagai pihak yang berkuasa melawan seorang mahasiswa bernama Hasya adalah gambaran yang cukup bertolak belakang dengan fungsi polisi.

Pemenuhan rasa aman, dan jaminan fungsi ketertiban yang seharusnya diberikan oleh negara yang telah tererosi berpotensi dikompensasi melalui keamanan alternatif. Warga tidak lagi mengandalkan polisi sebagai pelindung, dan dalam erosi kepercayaan ini justru menempatkan polisi sebagai pihak antagonis.

Keamanan alternatif justru akan memperumit kehidupan bernegara. Tiap-tiap orang akan menggunakan moda keamanannya dalam upaya perlindungan pribadi.

Melalui erosi kepercayaan ini, pengalaman kolektif orang-orang, peran-peran antagonis, dan ketimpangan sosial akan terakumulasi. Boleh jadi tewasnya Hasya akan menjadi gerakan sosial yang mendesak reformasi kepolisian.

Pertanyaannya, apakah reformasi kepolisian tersebut harus dilakukan pasca orang-orang sudah turun kejalan? Semoga saja tidak.

Rasa frustrasi publik pada kepolisian sebenarnya sedang memanaskan tengah pengadilan Sambo. Ketidakpercayaan publik pada polisi pada kasus Sambo sebenarnya belum benar-benar membuat gerakan besar disebabkan korban pembunuhannya adalah sama-sama polisi. Sehingga publik masih menganggap bahwa kasus Sambo hanyalah satu dari kekacauan elite kepolisian.



Pemenuhan rasa aman, dan jaminan fungsi ketertiban yang seharusnya diberikan oleh negara yang telah tererosi berpotensi dikompensasi melalui keamanan alternatif. Warga tidak lagi mengandalkan polisi sebagai pelindung, dan dalam erosi kepercayaan ini justru menempatkan polisi sebagai pihak antagonis. Image : Istimewa)

PKS TOLAK

PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang



- Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Formil UU tentang Cipta Kerja
- Tidak mengakomodasi poin-poin perbaikan yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi
- Tidak memenuhi persyaratan adanya 'kondisi kegentingan yang memaksa'
- Jauh dari penghormatan terhadap semangat demokrasi yang mengedepankan partisipasi masyarakat



Amin AK, M.M.

Anggota Baleg DPR RI FPKS

Kami, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mendorong agar dilakukan perbaikan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme perubahan undang-undang di DPR dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan maksimal sejalan dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja

Hal ini disampaikan dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/02).



Aleg PKS Dukung KLHK Tertibkan Tambang Batubara Yang Merusak

Jakarta (28/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, bersama rombongan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, meninjau aktivitas tambang batubara yang diduga telah merusak lingkungan.

Akmal menerangkan, bahwa Komisi IV DPR RI bersama dengan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menertibkan kawasan tambang batu bara yang izinnya dipegang oleh PT Mulia Persada Kartanegara, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan ini telah beroperasi di kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang berlaku.

"Kami menerima laporan dan aspirasi dari berbagai komunitas masyarakat akan

terjadinya gangguan lingkungan akibat aktivitas tambang. Gangguan ini sampai mempengaruhi kualitas hidup masyarakat karena sudah menurunkan kualitas air dan membuat jalan berlubang", tutur Akmal.

Politisi PKS ini menyesalkan, bahwa eksploitasi tambang batu bara telah yang merusak lingkungan dan ekosistem alam, dan pastinya merugikan negara. Ia menjelaskan bahwa perlunya turun tangan negara untuk menghukum setegas-tegasnya.

"Keluhan masyarakat,

seperti sumber air yang bermasalah, jalan yang berlubang dan berbahaya buat masyarakat. Kita mendorong kepada pemerintah agar dengan tegas menindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, memberikan ruang lingkup pemerintah dan aparatnya untuk melakukan penertiban dan penindakan secara perdata maupun pidana," Tegas Andi Akmal.

Pria kelahiran Bone ini memastikan, akan terus mendorong komisi IV dan pemerintah untuk mengawal proses hukum yang berlaku. Masyarakat mesti mendapat perlindungan sehingga diperlukan kehadiran negara untuk menjamin hak-hak masyarakat yang tidak mampu mereka dapatkan jika pemerintah tidak turun tangan.

"Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti kasus ini melalui rapat kerja gabungan dengan seluruh instrumen terkait. Tentu saja, sekaligus menginventarisir dan mengusulkan penyegelan terhadap tambang di kawasan hutan yang belum ada izinnya. Intinya, Komisi IV mendorong pemerintah agar dengan tegas menindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Lingkungan dan Kehutan," tutup Andi Akmal Pasluddin.



"Keluhan masyarakat, seperti sumber air yang bermasalah, jalan yang berlubang dan berbahaya buat masyarakat. Kita mendorong kepada pemerintah agar dengan tegas menindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, memberikan ruang lingkup pemerintah dan aparatnya untuk melakukan penertiban dan penindakan secara perdata maupun pidana,"

**DR. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI



Aleg PKS Minta Bapanas, Bulog dan ID Food Tak Jadi Sarang Mafia Pangan

Jakarta (08/02) --- Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet berharap berdirinya Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah untuk mengatur semua pihak yang bermain dalam bisnis dan distribusi pangan yang berdampak pada mundurnya pertanian Indonesia dan semakin meningkatnya volume impor pangan.

"Kehadiran Bapanas seharusnya menjadi antitesa mafia pangan, paling tidak mengimbangi atau mengurangi, namun setelah membaca roadmap kok seperti tidak nyambung," ujar Slamet di Jakarta.

Slamet menilai program-program dari roadmap Bapanas tidak mencerminkan misi besar sebagai antitesa mafia pangan. Bapanas hanya seperti pemadam kebakaran ketika terjadi inflasi.

"Roadmap tidak menjelaskan bagaimana menghadirkan kedaulatan dan kemandirian pangan dan mengangkat kesejahteraan petani. Ratusan milyar anggaran program tapi tidak mencerminkan kearah misi tersebut. Hanya satu program yang mengarah yaitu Penyusunan Blue print dan Penguatan Kerja sama lintas K/L" tapi itupun tidak muncul dalam penjelasan kepala Bapanas tadi," tambahnya.

"Sepertinya antara harapan kami komisi IV terhadap peran Bapanas dengan apa

yang dipikirkan kepala Bapanas sendiri ada perbedaan yang sangat jauh," imbuhnya.

Kemudian, kata Slamet, masalah yang terjadi saat ini soal produksi pangan, bukan di petani yang tidak mau menanam tapi masalahnya tidak ada jaminan jika mereka menanam produknya akan laku dan menguntungkan buat masa

depan mereka.

Saat momentum bertemu dengan konstituen petani dan kita bertanya siapa yang mewariskan pekerjaan bapak kepada anaknya? tidak ada yang angkat tangan pak, inilah keprihatinan dan ancaman untuk masa depan Indonesia.

Sedangkan untuk BUMN Pangan, Slamet menilai tidak ada kejelasan.

"Untuk ID FOOD benar gak sih program itu riil? Dimanakah titiknya? Jangan-jangan ID FOOD hanya broker untuk jual kuota GPS ke pihak lain. Harus dibuktikan bahwa Bapanas, Bulog dan ID Food bukan menjadi bagian dari mafia pangan tapi menjadi antitesa dari mafia pangan," pungkasnya.

"Roadmap tidak menjelaskan bagaimana menghadirkan kedaulatan dan kemandirian pangan dan mengangkat kesejahteraan petani. Ratusan milyar anggaran program tapi tidak mencerminkan ke arah misi tersebut. Hanya satu program yang mengarah yaitu Penyusunan Blue print dan Penguatan Kerja sama lintas K/L" tapi itupun tidak muncul dalam penjelasan kepala Bapanas tadi,"

dr. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

**PKS**
LEGISLATIVE
CORNER

Tanggapi Soal Wacana
Jalan Berbayar,

**Aleg PKS:
Tak Solutif
dan Beratkan
Masyarakat!**

Jakarta (28/01) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menyatakan dirinya tak setuju dengan wacana penerapan Electronic Road Pricing di DKI Jakarta.

"Fraksi PKS menolak rencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing) di beberapa ruas jalan di Jakarta", tegas Suryadi dalam acara PKS Legislatie Corner, Jumat (27/01).

Menurutnya, ERP bukan cara yang efektif untuk mengatasi tingkat kemacetan yang parah di Jakarta.

"Justru kebijakan ini hanya akan memindahkan kemacetan dari ruas jalan yang satu ke ruas jalan yang lain", ujarnya menjelaskan.

Selain itu, menurut Suryadi, pemberlakuan tarif kepada masyarakat untuk melewati ruas jalan tertentu di Jakarta hanya akan memberatkan kondisi ekonomi mereka.

"Masyarakat saat ini memiliki beban akibat dampak pandemi covid-19 yang sudah hampir berjalan tiga tahun, ditambah lagi dengan resesi ekonomi dan ketidakpastian global. Apabila kebijakan ini diterapkan, beban yang ditanggung akan makin berat", ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Lombok tersebut.

Oleh sebab itu, ia meminta Pemerintah untuk melihat masalah kemacetan di Jakarta ini secara komprehensif.

"Jangan sampai solusi yang ditawarkan bukan solusi yang bersifat parsial, yang justru malah menimbulkan masalah lain", ucapnya.

Terakhir, Suryadi menawarkan sejumlah opsi-opsi kebijakan yang bisa diambil oleh Pemerintah, dan

menurutnya, itu akan lebih efektif dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.

"Solusi yang kami tawarkan adalah Pemerintah perlu mengendalikan jumlah kepemilikan kendaraan di suatu daerah tertentu. Artinya, bagi masyarakat menengah ke atas yang sudah memiliki kendaraan, jangan sampai Pemerintah memberikan subsidi kembali bagi mereka untuk memperoleh kendaraan. Selain itu, Pemerintah perlu memprioritaskan sarana transportasi publik yang masif dan terintegrasi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas", pungkasnya.

Solusi yang kami tawarkan adalah Pemerintah perlu mengendalikan jumlah kepemilikan kendaraan di suatu daerah tertentu. Artinya, bagi masyarakat menengah ke atas yang sudah memiliki kendaraan, jangan sampai Pemerintah memberikan subsidi kembali bagi mereka untuk memperoleh kendaraan.

**H. SURYADI JAYA
PURNAMA, S.T**

Anggota Komisi V DPR RI



Aleg PKS: Alih Teknologi Harus Jadi Syarat Pengelolaan Pelabuhan Patimban

Jakarta (31/01) -- Mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Laut (31/01/2023), Toriq Hidayat menyebutkan bahwa Pelabuhan Patimban masuk ke dalam Peta sebaran kegiatan strategis pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan tahun anggaran 2023.

“Setelah sukses pengelolaan terminal kendaraan, selanjutnya pemerintah menyiapkan pembangunan terminal peti kemas. Anggaran yang akan dikeluarkan untuk pengembangan Pelabuhan Patimban sebesar Rp. 133,05 Milyar. Dana bersumber dari pinjaman luar negeri,” ujar Toriq.

Bahkan, kata Politisi PKS, saat ini PT Pelabuhan Patimban Indonesia (PPI) sedang melakukan proses memilih mitra strategis internasional untuk mengoperasikan terminal peti kemas tersebut. Sebelumnya PPI menunjuk PT Toyota Tsusho Corporation dalam mengelola terminal kendaraan, pada 17 Desember 2021 dilakukan ekspor perdana kendaraan.

“Terkait proses seleksi yang dilakukan PPI, diharapkan Dirjen Perhubungan laut ikut memberikan pengawasan. Supaya mitra strategis nantinya

adalah perusahaan yang memang memiliki pengalaman mengelola Pelabuhan Internasional, Perusahaan perkapalan besar dengan network yang luas dan memiliki standar operasi Internasional,” pinta Toriq.

enurutnya, tidak kalah

penting juga adanya persyaratan kerja sama transfer teknologi yang diberikan kepada calon pengelola. Untuk pengembangan ekonomi secara maksimal maka Pemerintah harus mendorong berpindahnya ilmu terapan yang dimiliki mitra kerja sehingga dapat dimiliki oleh Indonesia.

“Sebagai negara maritim, kita memiliki potensi wilayah yang memadai dan sektor tenaga kerja yang lebih mudah. Kelemahannya tidak memiliki kemampuan pengelolaan pelabuhan yang baik. Bukan tidak mungkin dengan alih teknologi, Indonesia akan naik kelas menjadi aktor utama industri Pelabuhan di Asia Tenggara,” tutup Toriq.

“Sebagai negara maritim, kita memiliki potensi wilayah yang memadai dan sektor tenaga kerja yang lebih mudah. Kelemahannya tidak memiliki kemampuan pengelolaan pelabuhan yang baik. Bukan tidak mungkin dengan alih teknologi, Indonesia akan naik kelas menjadi aktor utama industri Pelabuhan di Asia Tenggara

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi V DPR RI

Anggota FPKS: Target RPJMN Bidang Jalan Kini Sudah Jauh Panggung dari Api

Jakarta (31/01) — Dua pekan terakhir ini telah dan masih akan dilaksanakan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 antara Komisi V DPR RI dengan para mitra kerja, salah satunya Kementerian PUPR.

Tentu saja di dalamnya menghadirkan Menteri PUPR pada saat Rapat Kerja (Raker), dan menghadirkan para pejabat eselon satu pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Memperhatikan pemaparan mitra kerja, khususnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Bina Marga, ada beberapa sorotan terkait capaian atau realisasi pelaksanaan anggaran bidang jalan tahun 2022 terhadap target yang dicanangkan.

Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo menyimpulkan

bahwa target yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bidang jalan tak akan bisa diwujudkan.

"Merujuk materi paparan yang telah disampaikan oleh Pak Dijen Bina Marga, realisasi pelaksanaan anggaran bidang jalan tahun 2022 dibandingkan dengan target yang ingin dicapai hingga akhir masa pemerintahan tahun 2024 sudah jauh panggang dari api," katanya.

Beberapa indikasi mendasari kesimpulan dari legislator Fraksi PKS tersebut.

Indikator pertama adalah panjang jalan tol baru yang terbangun dan atau beroperasi. Pada dokumen RPJMN disebutkan target tahun 2024 yaitu 2.500 kilometer jalan tol baru yang terbangun dan atau beroperasi. Sementara status hingga akhir tahun 2022 capaian kumulatif panjangnya baru 532 kilometer.

"Realisasi kumulatif hingga tahun 2022 hanya 532 kilometer, padahal target kumulatifnya 947 kilometer atau realisasi 56 persen. Realisasi kumulatif hingga tahun 2022 dibandingkan target kumulatif hingga 2024 baru 21 persen, padahal waktu tersisa kurang dari dua tahun. Hampir mustahil target 2024 bakal tercapai," jelas Sigit.

Indikator kedua, imbuhnya, adalah panjang jalan nasional baru yang terbangun pada tahun 2020-2024 yaitu 3.000 kilometer.

"Capaian kumulatif hingga akhir tahun 2022 panjang jalan nasional baru yang terbangun 1.444 kilometer, sementara target kumulatifnya di tahun yang sama panjang jalan nasional baru yang terbangun sebesar 1.745 kilometer," ujarnya.

Berarti, lanjutnya, realisasi kumulatif terhadap target kumulatif tahun 2022 besarnya 83 persen, dan realisasi kumulatif hingga tahun 2022 terhadap target RPJMN baru tercapai 48 persen.

"Indikator ketiga adalah persentase kondisi mantap jalan nasional sebesar 97% pada tahun 2024," jelasnya.

Capaian kumulatif hingga akhir tahun 2022, kata Sigit, kondisi mantap jalan nasional besarnya 92,18 persen. Di sisi lain target kumulatifnya di tahun yang sama kondisi mantap jalan nasional sebesar 95 persen.

"Ini kan maknanya target

kumulatif kondisi mantap jalan tahun 2022 tidak tercapai. Dan saat ini berangkat dari kondisi mantap jalan yang hanya 92,18 persen, ingin mencapai kondisi mantap jalan 97 persen pada tahun 2024, ya tak mungkin lagi kalau lihat alokasi anggaran bidang jalan. Dari tiga indikator saja saya simpulkan target RPJMN bidang jalan sudah jauh panggang dari api." Pungkasnya.



Realisasi kumulatif terhadap target kumulatif tahun 2022 besarnya 83 persen, dan realisasi kumulatif hingga tahun 2022 terhadap target RPJMN baru tercapai 48 persen.

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI



Aleg PKS Minta Kemendes Ubah Pengelolaan Dana Desa Berdasar Skala Prioritas

Jakarta (08/02) --- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fraksi Partai PKS, Syahrul Aidi Maazat menyoroti tentang penggunaan dana desa untuk tahun 2023 yang terkesan regulasinya membuat bingung kepala desa dan terkesan susah untuk diterapkan.

Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Eselon I Kementerian Desa PDTT, Selasa (07/02/2022).

Syahrul menyebutkan bahwa selama ini alokasi dana desa berbasis persentase. Tidak ada fleksibilitas dalam penggunaannya. Padahal kebutuhan setiap desa itu tidak sama.

"Regulasi penggunaan dana desa untuk tahun 2023 sama kasusnya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Bahwasanya selalu saja berdasarkan persentase. Kenapa tidak membuat regulasi itu berdasarkan pada kriteria dan kebutuhan. Kita tahu bahwasanya desa di Indonesia ini yang lebih dari 74.000 itu karakternya beda-beda. Desa di Sumatera dan desa di Jawa berbeda tetapi kenapa regulasinya selalu sama berbasis persentase," terang Syahrul Aidi.

Dia mencontohkan pada anggaran desa itu BLT 10%, kata dia, bisa saja ada desa

yang tidak harus menggunakan dana desanya 10% untuk BLT.

"Saya pernah menemukan desa penduduknya itu hanya 120 orang. Mereka dapat dana desa itu 600-700 juta karena wilayahnya memang sangat sangat terpencil yang dibutuhkannya adalah

infrastruktur, air bersih" katanya.

Dan juga ia sempat menyinggung bahwa regulasi tentang penggunaan dana desa membuat kepala desa bingung. Ada regulasi dari Kementerian Desa terus ada lagi dari Kementerian Keuangan.

"Mohon untuk ke depannya regulasi penggunaan dana desa tidak lagi berbentuk persentase tetapi pada tahun berikutnya berbentuk kriteria sesuai kebutuhan. Begitu juga regulasi, jangan sampai tumpang tindih antar kementerian," tutupnya.

Regulasi penggunaan dana desa untuk tahun 2023 sama kasusnya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Bahwasanya selalu saja berdasarkan persentase.

Kenapa tidak membuat regulasi itu berdasarkan pada kriteria dan kebutuhan. Kita tahu bahwasanya desa di Indonesia ini yang lebih dari 74.000 itu karakternya beda-beda. Desa di Sumatera dan desa di Jawa berbeda tetapi kenapa regulasinya selalu sama berbasis persentase

**Dr. H. SYAHRUL
AIDI MAAZAT, Lc., M.A.**

Anggota Komisi V DPR RI

Pemerintah Pangkas Jumlah Bandara Internasional

Aleg PKS: Bukti Bahwa Selama Ini Tidak Taat Aturan

Jakarta (10/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hamid Noor Yasin menanggapi rencana Pemerintah yang akan memangkas jumlah bandara Internasional untuk menekan banyaknya pintu keluar warga Indonesia yang wisata ke luar dan mendorong pariwisata dalam negeri.

Wacana ini sendiri, imbuh Hamid, sudah disampaikan oleh Pemerintah sejak tahun 2020, dimana saat ini, Indonesia memiliki 32 bandara Internasional dan Pemerintah berencana untuk menguranginya menjadi hanya 15 bandara saja.

"Dari seluruh bandara internasional tersebut, hanya satu bandara yang jumlah penumpang asingnya lebih banyak daripada penumpang Indonesia, yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, sedangkan bandara lainnya kebanyakan justru

melayani WNI yang ingin pergi ke luar negeri," jelas Anggota Komisi V DPR RI ini.

Sayangnya, lanjut Hamid, Bandara I Gusti Ngurah Rai, dalam survei bandara Internasional dunia yang diadakan oleh Skytrax berada pada peringkat ke-89 pada tahun 2022, turun tujuh tingkat dari tahun 2021. Lebih buruk daripada Bandara Soekarno-Hatta yang berada pada peringkat ke-51.

"FPKS memandang bahwa Pemerintah terlambat membuat aturan terkait kriteria penetapan

an bandara internasional. Aturan yang cukup detail terkait tata cara penetapan bandara internasional ini baru ada pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM 39 Tahun 2019 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional," ujar Anggota DPR dari Dapil Jateng IV.

Pada peraturan tersebut, imbuhnya, ditetapkan kriteria bandara yang dapat dijadikan bandara internasional, yaitu pada Pasal 39 ayat 4 yang menyebutkan pengusulannya harus disertai kajian berupa potensi wisatawan mancanegara yang menggunakan angkutan penerbangan paling sedikit 100.000 wisatawan mancanegara per tahun.

"Selain itu, Pasal 39 ayat 6 juga mensyaratkan untuk bandara internasional yang ditujukan untuk menunjang kegiatan industri dan perdagangan harus ada kajian potensi industri dan/atau perdagangannya," jelasnya.

Sedangkan pada aturan lama, imbuhnya, yaitu Permenhub PM 69 Tahun 2013 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional belum ada aturan tersebut sehingga bandara internasional yang telah terlebih dahulu ditetapkan sebelum tahun 2019 malahan berfungsi untuk mempermudah WNI untuk pergi keluar negeri dan bukannya menjadi gerbang wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia.

"Terhadap rencana Pemerintah untuk memangkas jumlah bandara internasional, FPKS menganggap bahwa memang harus begitu peraturannya. Permenhub PM 39 Tahun 2019 Pasal 40 menyebutkan bahwa bandara yang telah ditetapkan sebagai

bandara internasional harus dievaluasi oleh Dirjen Perhubungan Udara, di antaranya terhadap tercapainya target angkutan udara luar negeri," pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id



"FPKS memandang bahwa Pemerintah terlambat membuat aturan terkait kriteria penetapan bandara internasional. Aturan yang cukup detail terkait tata cara penetapan bandara internasional ini baru ada pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM 39 Tahun 2019 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional,"

Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota Komisi V DPR RI

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atakrif Substantif



Mengenalkan tokoh pahlawan bangsa dan perjuangannya kepada generasi bangsa agar dapat meneladani mereka dan tidak ada mata rantai sejarah yang putus.

RDP dengan BUMN Ultra Mikro, Aleg PKS Minta Rentenir Diberantas

Jakarta (02/02) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi VI Dengan BUMN Ultra Mikro

yang terdiri dari Dirut BRI, Dirut Pegadaian, Dirut PNM, menyampaikan agar Perusahaan pemerintah yang berfokus pada penguatan usaha mikro dapat mendorong binaannya meningkatkan skala usaha.

Legislator asal Sumatera Barat II ini berharap Holding BUMN Ultra Mikro lebih agresif dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan upaya mendukung tumbuh kembang usaha ultra mikro. Hal tersebut disampaikannya mengingat perlunya stimulus bagi usaha ultra mikro agar bisa 'naik kelas'.

"Kami berharap BRI, Pegadaian, PNM semakin agresif lagi dalam menjalankan program-program untuk

menumbuh dan mengembangkan usaha sektor ultra mikro, mengingat sektor ultra mikro dengan skala usaha lebih kecil dibandingkan dengan skala sektor mikro. Mereka perlu diberikan stimulus untuk dapat naik kelas," ujar Nevi Zuairina dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta

Nevi menerangkan, Pada tahun 2021, pemerintah resmi membentuk Holding BUMN Ultra Mikro yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dengan BRI sebagai induk holding.

Sebelumnya, kepada Direktur Utama BRI, Direktur Utama Pegadaian dan Direktur Utama PMN, politisi PKS ini sempat menanyakan sinergi holding dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Menurut Nevi Zuairina, sinergi ini menjadi penting karena pangsa pasar Holding Ultra Mikro adalah termasuk UMKM dan Kemenkop UMKM merupakan lembaga yang secara khusus didirikan untuk menangani UMKM di Indonesia

"Bagaimana Sinergi Holding Ultra mikro dengan Kementerian Koperasi UMKM? Seperti apa pencapaiannya? Ini penting karena ini kementerian yang sudah dibentuk oleh Presiden untuk mengurus UMKM sebagai tupoksinya," katanya.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga menyoroti jumlah pendamping dalam program Mekar yang digagas oleh PMN. Disampaikannya, pendamping atau account officer memiliki peran yang tinggi dalam mengedukasi nasabah sehingga mereka dapat melakukan pembayaran secara teratur bahkan meningkatkan nilai pinjaman. Ia pun mendorong agar PMN memastikan jumlah pendamping ini sebanding dengan kebutuhan para nasabah.

"Mengenai Mekar, apakah jumlah pendamping sudah proporsional dengan jumlah nasabah Mekar yang terus



meningkat?," tanya Politisi PKS ini.

"Kalau saya dengar di lapangan sebetulnya pencapaian luar biasa yang tadinya hanya pinjam Rp1 juta lama-lama jadi pinjam Rp 5 juta karena ada pendamping. Account officer itu yang mengedukasi mereka para pelaku UMKM sehingga mereka bisa membayar dengan tertib. Nah ini dikembangkan lebih ke depan karena ini program yang lebih membumi," lanjut Nevi

Dalam kesempatan yang sama, Nevi Zuairina terus mengingatkan kepada holding ultra mikro untuk menjangkau pelaku usaha ultra mikro yang belum tersentuh lembaga keuangan formal. Ia memberikan apresiasi kepada program Pegadaian Sahabat Desa yang menggandeng badan usaha desa dan berkeliling berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Upaya mendekati diri kepada calon nasabah nantinya diharapkan dapat mencegah masyarakat untuk tergjur goadaan kemudahan dari rentenir.

"Dengan demikian masyarakat desa yang jauh dari outlet pegadaian atau brilink atau account officer PNM dapat dilayani dengan baik. Ini penting pak. Mereka itu pinjam 4 bayar 6 berarti sebetulnya mereka bisa untuk pinjam uang dan bayar dengan bunga yang tinggi. Ini kalau

larinya ke rentenir kan sayang pak. Artinya kita harus basmi rentenir di muka bumi ini," tutup Nevi Zuairina.

"Bagaimana Sinergi Holding Ultra mikro dengan Kementerian Koperasi UMKM? Seperti apa pencapaiannya? Ini penting karena ini kementerian yang sudah dibentuk oleh Presiden untuk mengurus UMKM sebagai tupoksinya"

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI





Politik PKS Minta Pemerintah Serius Bangun Kereta Api di Aceh

Bandung (05/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Aceh Rafli saat rapat Komisi VI DPR RI dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) meminta pemerintah serius membangun moda transportasi publik kereta api yang dicanangkan menghubungkan Banda Aceh - Medan sejak beberapa dekade silam.

Bahkan Politisi Fraksi PKS itu membandingkan era Pemerintahan Hindia Belanda di Aceh kereta api mampu beroperasi, namun hingga 77 tahun Indonesia Merdeka proyek kereta api di Aceh masih belum teralisasi.

"Kereta api di Aceh sekarang cuma ada 3 gerbong namun tidak menghubungkan antar 1 kabupaten pun, jika berhistoris, dulu masa Belanda ada kereta api, menghubungkan Stasiun Koeta Raja (Banda Aceh) - Medan. Setelah merdeka 77 tahun semestinya ini sudah menjadi pemikiran kita bersama secara hati, untuk melakukan pemerataan pembangunan di Aceh, jangan hanya aset-aset dan tanah KAI aja di Aceh jadi bisnis, sehingga terjadi gesekan sosial disana. Harus ada jawaban psikologis bagi masyarakat, khusus buat Aceh saya harap dukungan komisi VI, agar tahun-tahun berikutnya ada kebijakan pemerintah untuk penyelesaian pembangunan kereta api di

Aceh" Ujar Rafli saat rapat dengan PT KAI, Kamis (02/02/2023) di Bandung "Saat ini di Aceh cuma stasiun Krueng Mane - Stasiun Bungkaih - Stasiun Krueng Geukueh yang sempat dilakukan uji coba dengan panjang lintasan 11,35 km sejak 3 November 2016" Kata Rafli

Jalur kereta api peninggalan Belanda di Aceh pernah akan dihidupkan kembali oleh Presiden Habibie pada tahun 1998. Namun rencana ini gagal, dan diwacanakan lagi pada 2002.

Tahun 2012, pemerintah

sempat menyiapkan anggaran untuk menghidupkan kembali jalur kereta api di Aceh. Tapi, anggaran tersebut ternyata dialihkan ke bidang irigasi.

Catatan sejarah kereta api Aceh, tahun 1874, rel kereta api pertama dibangun di Aceh oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-54, James Loudon, dengan lintasan Ulee Lheue - Kuta Radja.

Kereta api ini dioperasikan oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia - Belanda, Atjeh Tram (AT) yang berubah nama menjadi Atjeh Staats Spoorwegen (ASS) pada tahun 1916. Perusahaan tersebut mengelola perkeretaaapian di Aceh dengan panjang lintasan 511 km dengan total investasi yang pembangunannya sebesar 20.000.000 gulden atau setara ± Rp. 10,5 triliun jika dikonversi dengan nilai rupiah saat ini. Namun pada tahun 1982 angkutan kereta api Aceh berhenti total.

Untuk melakukan pemerataan pembangunan di Aceh, jangan hanya aset-aset dan tanah KAI aja di Aceh jadi bisnis, sehingga terjadi gesekan sosial disana. Harus ada jawaban psikologis bagi masyarakat

RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

**PKS**
LEGISLATIVE
CORNER

Minyak Goreng Murah
Hilang dari Pasaran,

**Politisi PKS:
Harus Tegas
terhadap Oligarki**

Jakarta (10/02) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak., menyatakan keanehan pada kondisi minyak goreng di Indonesia pada saat ini.

Indonesia sebagai negara dengan produsen CPO terbesar di Dunia, kata Amin, malah mengalami kekurangan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng.

Hal ini disampaikan dalam PKS Legislative Corner bersama dengan Komisi VI Fraksi PKS pada Jum'at (10/02).

Menurut Amin, terdapat kejadian aneh yang terjadi di Indonesia. Karena sebagai penghasil CPO (crude palm oil) terbesar, Indonesia malah mengalami krisis minyak goreng.

"Salah satu keanehan di Indonesia ini, Indonesia itu salah satu produsen CPO terbesar di dunia, hampir sebanyak 60%. Tetapi kenyataannya, pada triwulan ketiga tahun 2021 dan triwulan pertama tahun 2022, kurang lebih delapan bulan malah terjadi krisis minyak goreng," ujar Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Amin melihat keanehan ini masih terus terjadi. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mengatasi krisis minyak goreng. Salah satunya dengan keluarnya merk minyak kita. Akan tetapi, hal ini malah menimbulkan keanehan baru dengan langkanya minyak

goreng merk minyak kita ini.

"Kebijakan-kebijakan telah digulirkan, salah satunya dengan munculnya merk minyak goreng murah, yaitu minyak goreng kita. Anehnya, minyak goreng merk ini malah langka dan mahal di pasaran" ujar Amin.

Amin menduga, salah satu penyebab dari munculnya keanehan ini karena pemerintah yang lemah dihadapan produsen minyak goreng. Hampir 50% dikuasai oleh hanya beberapa produsen minyak goreng.

"Simpulan saya. Salah satu dugaan saya, pemerintah lemah kepada produsen mynka goreng. Hanya beberapa produsen yang menguasai hampir 50% dari CPO. Pemerintah lemah terhadap oligarki CPO," tegas Amin.

Krisis minyak goreng di Indonesia diperparah dengan menghilangnya minyak goreng murah bermerk minyak kita dipasaran. Hal ini menjadi ironis, karena lemahnya pemerintah terhadap oligarki minyak kembali merugikan rakyat kecil.

"Dibutuhkan ketegasan dari pemerintah, karena hal ini bukanlah hal yang sulit. Kita memproduksi CPO yang terbesar di dunia!" pungkas Amin.

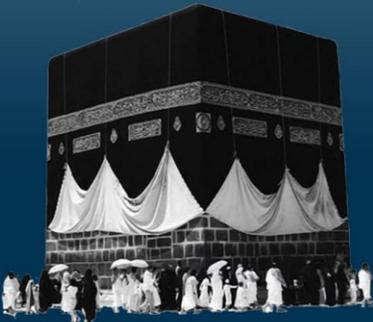
Salah satu penyebab dari munculnya keanehan ini karena pemerintah yang lemah dihadapan produsen minyak goreng. Hampir 50% dikuasai oleh hanya beberapa produsen minyak goreng. Simpulan saya. Salah satu dugaan saya, pemerintah lemah kepada produsen mynka goreng. Hanya beberapa produsen yang menguasai hampir 50% dari CPO. Pemerintah lemah terhadap oligarki CPO,"

AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI



PKS TOLAK Kenaikan Biaya Haji 2023 Bisa Lebih Murah Dari Yang Ditetapkan!

Biaya Penyelenggara
Ibadah Haji (BPIH), total
Rp 90,05 juta



Hasil dari pengelolaan
dana haji terbilang
konservatif dengan
imbal hasil rata-rata
3,5%-7% per tahun.

Biaya pelayanan masyair
masih terlalu mahal
Rp 13.82 juta

Biaya Perjalanan
Ibadah Haji (Bipih),
yang dibayar jamaah
Rp 49,81 juta

” Kita terlalu loma (Bahasa Jawa: murah hati) dan terlalu brah-breh (boros) terhadap orang Arab. Padahal seharusnya bisa melakukan penawaran yang jauh lebih baik.

H. Bukhori Yusuf, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI FKPS

Biaya yang masih dinilai masih terlalu memberatkan

 Biaya penerbangan
Rp 32,7 Juta

 Durasi perjalanan haji
mestinya dipangkas dari
40 hari menjadi
30-35 hari

 Kebijakan zonasi memicu
tingginya harga hotel
di kawasan tersebut
sehingga mesti ditiadakan

 Perlu terobosan catering
lebih kompetitif dan
memenuhi selera lidah
nusantara

 Bus solawat bisa
dibebankan kepada
pemilik hotel





Aleg PKS Minta Presiden Jokowi Jangan Lembek dengan Freeport

Jakarta (06/02) --- Terkait pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) oleh PT, Freeport Indonesia, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Presiden Jokowi jangan gegabah.

Mulyanto minta presiden memperhatikan aturan perpanjangan izin sesuai undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba. Selain itu presiden diminta jangan gampang termakan janji-janji manis yang ujung-ujungnya sering diingkari.

"Ini akan menjadi preseden buruk pelanggaran UU oleh Pemerintah yang kesekian kalinya. Karena Amanat UU Minerba tersebut sangat jelas bahwa pengajuan perpanjangan perizinan dilakukan paling cepat lima tahun sebelum masa izin berakhir dan paling lambat satu tahun sebelum masa izin berakhir. Kalau masa izin PTFI berakhir pada tahun 2031 maka pengajuan perpanjangan perizinan tersebut dilakukan paling cepat tahun 2026. Masih tiga tahun lagi. Kenapa harus diperpanjang sekarang? Ini kan aneh dan menimbulkan praduga yang tidak-tidak," jelas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan presiden harus mengevaluasi kontribusi PTFI kepada negara sebelum memberi perpanjangan perizinan ini. Apalagi perpanjangan izin tersebut tidak

berlaku otomatis atau 'dijamin' akan diberikan. MK telah membatalkan frasa 'jaminan' perpanjangan perizinan dalam UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba.

Sesuai amanat UU, Perlu evaluasi mendalam dan komprehensif oleh Pemerintah terkait kinerja perusahaan pertambangan ini sebelum diberikan perpanjangan izin, baik terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan, penerimaan negara, pengelolaan lingkungan, maupun kontribusi terhadap pembangunan, dll.

Menurut Mulyanto salah

satu catatan negatif yang paling mencolok dari PTFI ini adalah soal pembangunan smelter tembaga dan hilirisasinya. Secara terbuka perusahaan ini menyatakan tidak dapat merampungkan smelter tembaga sesuai dengan tenggat waktu tiga tahun yang diberikan UU Minerba, yakni bulan Juni tahun 2023.

Secara terbuka PTFI mengumumkan ke publik, bahwa fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga terbaru mereka yang berada di kawasan ekonomi khusus (KEK) JIPE Gresik, Jawa Timur, baru akan beroperasi pada bulan Mei 2024.

"Ini jelas-jelas melanggar amanat UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba. Pelanggaran UU terkait pembangunan smelter oleh PTFI ini bukan yang pertama kalinya," tegasnya.

Presiden harus mengevaluasi kontribusi PTFI kepada negara sebelum memberi perpanjangan perizinan ini. Apalagi perpanjangan izin tersebut tidak berlaku otomatis atau 'dijamin' akan diberikan. MK telah membatalkan frasa 'jaminan' perpanjangan perizinan dalam UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba.

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI



Desak Pergantian Kepala BRIN Segera, Legislator PKS: Kinerjanya Sangat Mengecewakan!

Jakarta (02/02) --- Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mendesak pergantian Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. Desakan ini senada dengan hasil keputusan rapat Komisi VII DPR RI dengan BRIN pada Senin (30/01)

dimana Pimpinan serta Peserta Rapat memutuskan dilakukannya audit khusus terhadap pagu anggaran BRIN Tahun Anggaran 2022 oleh BPK, dan juga mendesak Pemerintah untuk segera mengganti Kepala BRIN.

Desakan pergantian Kepala BRIN tersebut menurut Rofik dilatarbelakangi oleh kinerjanya yang mengecewakan sehingga tidak dapat mengoptimalkan sumberdaya BRIN, terlebih dengan total anggaran hingga 6,4 triliun.

"Kepala BRIN yang sekarang ini kurang memiliki kapasitas untuk mengelola BRIN ini sebagai lembaga riset nasional unggulan nasional dan kurang memahami amanat dan misi lembaga BRIN," ujar Rofik.

Rofik menjelaskan setelah peleburan lembaga riset menjadi BRIN melalui UU No. 1 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, BRIN telah menjadi lembaga satu pintu dari aspek pengembangan teknologi dan aplikasinya. Artinya kegiatan

riset dan penelitian tidak boleh hanya berhenti di atas kertas penelitian saja ataupun berupa teori saja tapi tersampaikan hasilnya dan dinikmati oleh masyarakat.

"Terbukti menurut catatan di tahun 2022 jumlah artikel ilmiah internasional yang terpublikasi adalah sebanyak 3862. Ini lebih besar dari target sebesar 2691 artikel. Namun sayangnya dari aspek penerapan dan inovasi belum berhasil," jelas Anggota DPR RI Fraksi PKS tersebut.

Lebih lanjut Rofik

menjelaskan dari target 125 jumlah inovasi yang dapat dinikmati oleh badan usaha atau industri, hanya terealisasi kurang dari 50% yaitu sebanyak 62 inovasi. Lembaga BRIN belum menunjukkan kinerja yang maksimal dalam berkontribusi kepada sektor industri dan masyarakat.

"Publikasi ilmiah tentu sangat penting, tapi apa artinya kalau tidak dapat dimanfaatkan hasilnya secara maksimal oleh masyarakat," imbuh anggota DPR Dapil Jateng VII tersebut.

Rofik menilai BRIN menghadapi permasalahan yang bersumber dari proses peleburan lembaga penelitian dan riset yang tidak berjalan mulus sehingga penataan dari sisi SDM belum menghasilkan kinerja yang maksimal. Bahkan terdapat ratusan peneliti yang kehilangan pekerjaan karena tidak tertampung di BRIN.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id

Dari target 125 jumlah inovasi yang dapat dinikmati oleh badan usaha atau industri, hanya terealisasi kurang dari 50% yaitu sebanyak 62 inovasi. Lembaga BRIN belum menunjukkan kinerja yang maksimal dalam berkontribusi kepada sektor industri dan masyarakat.

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI



Diah Nurwitasari Harap Kebijakan Pemerintah Tidak Merepotkan Rakyat



Bandung (02/02) — Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi PKS Diah Nurwitasari, bersama BPH Migas menyelenggarakan acara dengan tema Sinergitas BPH Migas dan DPR RI, Sosialisasi Subsidi BBM Tepat Sasaran.

Pada acara yang digelar di Ballroom Hotel Sun Shine Soreang Kabupaten Bandung ini tampak hadir Diah Nurwitasari dari Komisi VII DPR RI, Anggota Komite BPH Migas RI Saleh Abdurahman, General Manager Region Jabar PT. Pertamina Patra Niaga Fachrizal Imaduddin dan beberapa pejabat Pemkab Bandung yang mewakili Bupati Bandung.

Saleh Abdurahman sebagai perwakilan BPH Migas dalam sambutannya memperkenalkan BPH Migas beserta kiprahnya.

"Menurut Undang Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Migas, fungsi daripada BPH Migas (Badan Pengelola Hilir) Minyak dan Gas Bumi diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi. Kenapa harus diawasi? Karena BBM ini merupakan komoditas yang mencakup hajat hidup orang banyak." Ungkap anggota komite BPH Migas ini.

Saleh melanjutkan, "Terkait dengan Subsidi BBM, tentunya BPH Migas mengawasi

juga pemanfaatannya agar tepat sasaran karena subsidi BBM ini tidak hanya diberikan kepada sektor transportasi, diberikan juga kepada sektor non transportasi seperti petani, nelayan, rumah sakit dan lain sebagainya oleh karena itu kami mengajak masyarakat untuk bijak dalam pemakaian

BBM ini." Harapnya.

Adapun Diah Nurwitasari, sebelum secara resmi membuka acara sosialisasi yang dihadiri sekitar 200 orang ini, beliau menghaturkan apresiasi kepada BPH Migas, "Terima kasih kami ucapkan kepada BPH Migas yang telah berkolaborasi bersama kami Komisi VII DPR RI untuk mengedukasi masyarakat agar subsidi energi terutama BBM dari pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran." ucap aleg perempuan kandidat doktor ini.

Selengkapnya kunjungi fraksidr.pks.id

Kami berhadapan dengan sebuah tantangan yang tidak sederhana, di komisi VII DPR RI di satu sisi kami menjadi wakil rakyat yang harus menyuarakan aspirasi dan kegelisahan rakyat tapi di saat yang sama kami pun memiliki peran sebagai mitra dari pemerintah yang juga harus mendengarkan tentang berbagai macam kondisi yang sedang dihadapi oleh pemerintah untuk dicarikan solusi terbaiknya demi kebaikan rakyat.

Dipl.Ing. Hj. **DIAH NURWITASARI, M. I. POL.**
Anggota Komisi VII DPR RI



NHZ Dukung Sembilan Tuntutan SP-PLN Indonesia, yang ke-8 Bikin Wow

Jakarta (11/02) -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Nurhasan Zaidi, menyampaikan langsung aspirasi dari Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP-PLN) kepada Direktur Utama (Dirut) PT. PLN, Darmawan Prasodjo, pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN di Gedung DPR RI, Rabu (8/2).

Sebagai Anggota Komisi VII, NHZ, sapaan akrab Nurhasan Zaidi, mendukung penuh apa yang menjadi aspirasi para pekerja di lingkungan perusahaan listrik negara ini.

Menurutnya, hal itu patut didukung lantaran 9 point yang menjadi tuntutan SP-PLN adalah keresahan mereka selama ini yang harus segera ditangani oleh negara.

"Ya kita dukung, apa yang menjadi aspirasi mereka, tuntutan mereka, agar mereka sejahtera dan rakyat juga senang," katanya kepada awak media.

Adapun ke-9 point tuntutan SP-PLN Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tolak kenaikan tarif listrik sesuai tarif pasar.
2. Tolak privatisasi PLN sesuai Putusan MK Nomor 111.
3. Batalkan restrukturisasi pembentukan holding,

subholding PLN yang bertujuan untuk memudahkan privatisasi PLN ke depan.

4. Batalkan legal and state holding, subholding PLN
5. Batalkan pembubaran PLN, pembangkit PLN.
6. Stop penyerahan aset publik yang harus dikuasai negara diserahkan ke swasta atau subholding senilai Rp300 Triliun.
7. Stop pemaksaan diskriminasi pegawai PLN dengan memutasikan pekerja dengan program tugas karya.
8. Stop pemberangusan terhadap Serikat Pekerja PT PLN.
9. Stop PHK Ilegal Saudara Rudy Setiawan.



"Ya kita dukung, apa yang menjadi aspirasi mereka, tuntutan mereka, agar mereka sejahtera dan rakyat juga senang,"

H. NURHASAN Zaidi, S.Sos.I
Anggota Komisi VII DPR RI



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri



Aleg PKS Minta BPKH Susun Peta Jalan Pola Pembiayaan Haji

Bukhori kembali menegaskan soal usulannya agar biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang dibebankan pada calon jemaah haji tahun ini cukup berada di angka Rp50 juta. Selain lebih rasional untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji ke depan, Bukhori menilai angka tersebut lebih terjangkau bagi calon jemaah dan tidak terlalu memberatkan.

Jakarta (28/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta BPKH untuk menyusun peta jalan (roadmap) pola pembiayaan haji dengan proporsi 70 (Bipih) : 30 (nilai manfaat).

“Saya mengharapkan perlu ada roadmap yang lebih clear untuk membuat pola pembiayaan penyelenggaraan haji dengan proporsi 70:30. Usulan kami, paling cepat 8-10 tahun,” kata Bukhori di Jakarta, Jumat (27/01/2023).

Legislator Dapil Jateng 1 ini mengaku keberatan jika calon jemaah tahun 2023 menanggung beban biaya yang terlalu tinggi. Sebaliknya, Bukhori meminta kenaikan dana haji dilakukan secara bertahap.

“Kami tidak setuju kenaikan biaya yang terlalu tinggi ini dibebankan pada calon haji tahun ini saja.

Kenaikan semestinya dilakukan secara perlahan, dimulai dengan peningkatan setoran awal. Sementara di sisi lain, BPKH harus mampu meningkatkan nilai manfaat hasil dari pengelolaan dana dari 5,3 juta jemaah haji kita yang senilai Rp167 triliun itu.”

terangnya.

Sementara itu, Bukhori kembali menegaskan soal usulannya agar biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang dibebankan pada calon jemaah haji tahun ini cukup berada di angka Rp50 juta. Selain lebih rasional untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji ke depan, Bukhori menilai angka tersebut lebih terjangkau bagi calon jemaah dan tidak terlalu memberatkan.

“Kami mengusulkan agar jemaah cukup dibebankan sebesar Rp50 juta, sementara sisanya akan di-cover melalui dana optimalisasi,” pungkasnya.

“Saya mengharapkan perlu ada roadmap yang lebih clear untuk membuat pola pembiayaan penyelenggaraan haji dengan proporsi 70:30. Usulan kami, paling cepat 8-10 tahun

H. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI



Apresiasi MK Kembali Tolak Perkawinan Beda Agama,

HNW: Harus Diikuti dan Ditaati Semua Pihak Terkait

Jakarta (31/01) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang kembali menolak permohonan perkawinan beda agama dalam uji materi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

serta berharap seluruh pihak harus mengikuti dan mematuhi putusan yang sudah sejalan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

“Itu perkara yang sudah berkali-kali terkait perkawinan beda agama, yang ditolak oleh MK. Maka harusnya semua pihak mengikuti dan mematuhi putusan MK ini dan putusan-putusan sebelumnya. Karena memang itulah yang sesuai dengan UU dan ajaran Agama yang diakui di Indonesia,” ujarnya melalui siaran pers di

Jakarta, Selasa (31/01).

Apresiasi terhadap putusan ini disampaikan karena sejalan dengan yang telah diingatkan oleh Hidayat Nur Wahid pada 11 Februari 2022 lalu ketika di awal perkara ini disidangkan oleh MK. Dalam sejumlah kesempatan lainnya, Hidayat juga berulang kali mengingatkan ketentuan-ketentuan UUD NRI 1945 yang sangat menghormati ajaran agama, termasuk dalam hal pelarangan perkawinan beda agama.

HNW sapaan akrabnya

mengatakan seluruh pihak yang dimaksud, di antaranya, adalah para calon mempelai, juga para hakim di pengadilan negeri yang kerap membolehkan pencatatan perkawinan beda agama. Pada 2022 ini saja, sudah tiga hakim di sejumlah pengadilan negeri yang membolehkan hal tersebut.

“Semoga ke depannya, tidak ada lagi calon mempelai yang mengabaikan keputusan MK ini, juga para hakim di pengadilan negeri tidak ada lagi yang memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW berharap agar penetapan-penetapan hakim di PN itu bisa segera dikoreksi dengan kembalinya ditegaskan oleh MK bahwa perkawinan beda agama tidak sejalan dengan konstitusi kita. Apalagi, lanjutnya, MK juga secara tegas tetap pada pendiriannya bahwa konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama yang sah di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan.

“Maka putusan MK ini harus dirujuk oleh MA dan hakim-hakim di bawahnya, sehingga tidak terjadi lagi perkawinan beda agama yang tidak sah menurut agama atau UU Perkawinan, yang juga tidak dibenarkan oleh MK,” tukasnya.

Berbekal putusan MK ini, HNW juga berharap ke depan juga perlu dilakukan perbaikan

regulasi, terutama revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), terutama pada Penjelasan Pasal 35 huruf a. Ketentuan itu kerap digunakan sebagai dasar bagi para hakim di pengadilan negeri untuk membolehkan pencatatan perkawinan beda agama.

“Dengan kembali hadirnya keputusan MK itu, DPR dan Pemerintah harusnya segera merevisi ketentuan soal pencatatan perkawinan, agar sejalan dengan tafsir dan keputusan konstitusionalitas MK yang oleh UUD NRI 1945 disebut sebagai bersifat final dan mengikat, bahwa perkawinan beda agama tidak sejalan dengan UUD NRI 1945, konstitusi yang telah kita sepakati bersama berlaku di seluruh kawasan NKRI,” ujar Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Langkah tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan terhadap konstitusi, serta lembaga yang diberi kewenangan untuk menafsirkan konstitusi di Indonesia yaitu MK.

“Jadi, dengan adanya putusan MK ini, kembali ditegaskan bahwa perdebatan apakah perkawinan beda agama dibolehkan dalam sistem hukum di Indonesia atau tidak, harusnya sudah selesai. Yakni, sesuai keputusan MK, perkawinan beda agama tidak

sah dan tidak diakui dalam ketentuan konstitusi, hukum positif, dan agama yang diakui di Indonesia,” pungkasnya.

Dengan adanya putusan MK ini, kembali ditegaskan bahwa perdebatan apakah perkawinan beda agama dibolehkan dalam sistem hukum di Indonesia atau tidak, harusnya sudah selesai

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI



Erick Thohir Ketum PSSI

Mudah-mudahan Tidak Cuma Sekedar Kendaraan untuk Popularitas



Proses sudah berjalan, selamat untuk Pak Erick Thohir jadi Ketua Umum PSSI.

Tentu semua punya harapan besar. Mudah-mudahan tidak cuma sekedar menjadi kendaraan untuk popularitas dan sebagainya. Tapi kami percaya bahwa beliau mau memperbaiki persepabolaan Indonesia

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI



Biaya Haji 2023, Aleg PKS: Harus Rasional, Adil, dan Berkelanjutan

Jakarta (10/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis (IQL) tetap menolak kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai 69 juta.

Penolakan ini, kata Iskan, sejalan dengan sikap PKS yang menginginkan biaya Haji yang rasional, adil, dan berkelanjutanannya.

Menurut Iskan Muassasah harus mengaudit biaya masjid yang naik signifikan hingga 3 kali lipat. Yang awalnya sekitar 1800 riyal atau setara Rp7,22 Juta (kurs: 4015) menjadi 5.656 riyal atau setara Rp22,71 Juta.

"Kenaikan yang meroket ini perlu dipertanyakan sehingga dibutuhkannya auditor internasional syariah untuk mentransformasi masalah pembiayaan ini," ungkapnya.

Kalau dalam hasil audit ada kelebihan bayar, kata Iskan, supaya dikembalikan dalam

bentuk kompensasi biaya haji 2023 Bahkan bukan hanya audit untuk masalah masyair saja menurut IQL, biaya penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines harus juga dilakukan audit.

"Umpamanya garuda, ayo kita bikin skema pembiayaan dengan BPKH atau system KSO akan meringankan biaya penerbangan karena menghemat, perbedaan kurs, dan harga sewa pesawat atau beli avtur lebih murah karena dibayar di muka Ini kan bisa dibuat agar gimana caranya biaya haji ini turun," ungkap Iskan.

Iskan juga meminta BPKH untuk menaikkan nilai manfaat

2023 menjadi minimal Rp11,5 Triliun (Naik dari rencana awal Rp10 T). Bagian ini terdiri dari Rp7 T nilai manfaat BPIH dan Rp2 T untuk Virtual Account (VA) atau Rp5 Juta per jamaah. Dengan demikian BPKH dapat menggunakan nilai manfaat akumulatif (tersedia Rp15 T).

"Nilai manfaat yang ditetapkan oleh BPKH Rp10 T terlalu kecil, dengan Dana Kelolaan Rp165 T dan return hingga 7% net bisa mencapai Rp11,6 T. Saya yakin BPIH bisa turun menjadi seminimalnya Rp85 Juta dan nilai manfaat bisa Rp40 juta dan Bipih 45 juta (5 juta dibayar dari VA dan pelunasan Rp15 juta)" Jelas Iskan

"Jadi dengan adanya hitung – hitungan tersebut BPIH bisa menjadi lebih rasional dan adil. Karena beban para jamaah tahun ini tinggal melunasi sisa dari setoran awal yang ada," ungkapnya.

Jika sisa biph para jamaah ini terlalu besar, membuat banyak masyarakat yang akan gagal berangkat haji tahun ini. Padahal yang kita tahu, kebanyakan parah jamaah berasal dari kalangan petani, nelayan, dan pedagang kecil. Sehingga perlunya kajian mendalam kembali tentang BPIH ini agar tidak memberatkan semua kalangan.

"Jadi kita usul biaya pelunasan oleh jamaah tahun ini itu 15 Juta saja, ada

penambahan 5 juta dari tahun sebelumnya. ini hasil itungan saya tadi. Dan Jika BPIH ini tidak turun juga, kita akan buat skema sandingan lagi. Ini bukan tandingan ya. Ini agar bisa menjadi alternatif dari PKS

saja agar BPIH bisa turun. Karena kita inginkan masyarakat tidak terbebani dan adil. Dan biaya ini jadi lebih rasional, adil, dan berkelanjutan," kata Iskan mengakhiri.



Kalau dalam hasil audit ada kelebihan bayar, kata Iskan, supaya dikembalikan dalam bentuk kompensasi biaya haji 2023 Bahkan bukan hanya audit untuk masalah masyair saja biaya penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines harus juga dilakukan audit.

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II



Aleg PKS Suarakan Jeritan Rakyat Kecil yang Terbuang dari PBI BPJS Kesehatan

Jakarta (30/01) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menyuarakan jeritan rakyat kecil yang terbuang dari daftar program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan akibat proses data cleansing dari pemerintah.

Hal ini diungkapkan Kurniasih dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kesehatan untuk evaluasi program Kementerian Kesehatan tahun 2022 di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/01/2022). Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini mengatakan, seharusnya anggaran kesehatan masih cukup untuk memasukkan masyarakat kecil yang justru dikeluarkan dari daftar PBI BPJS Kesehatan.

Kurniasih memberi catatan masih tidak maksimalnya penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan pada 2022. Padahal jika bisa dimaksimalkan, ada banyak rakyat kecil yang bisa terbantu dari sisi manfaat saat masih ada di daftar PBI BPJS Kesehatan.

"Akibat data cleansing banyak yang curhat ke saya saat reses. Ada tukang pisang goreng, ada tukang bakso yang tadinya masuk ke PBI kena data cleansing akhirnya tidak masuk. Anggaran kesehatan ini jika dimaksimalkan untuk rakyat

tidak mampu pasti lebih bermanfaat," ujar Kurniasih.

Kurniasih menyadari jika program data cleansing BPJS Kesehatan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Kementerian Sosial. Meski begitu, Kurniasih meminta Kemenkes untuk berkomunikasi secara intens dengan Kemenkos agar benar-benar akurat dalam melakukan data cleansing.

Komisi IX, urai Kurniasih, juga pernah mengundang Kemensos untuk membicarakan hal ini. Ia berharap Kemenkes bisa menjalankan amanat UUD 1945 untuk menjamin kesehatan masyarakat tanpa pandang bulu. Jangan sampai anggaran tidak terserap maksimal justru yang dirugikan masyarakat tidak mampu.

"Ini masih ada yang benar-benar tidak mampu membayar kami harus mengadvokasi mereka sudah tidak mampu lalu sakit, kasihan sekali. Ini perjuangan bersama Komisi IX dengan Kemenkes. Dulu kita juga sudah mengundang Kemensos, mari kita sama-sama berjuang dan kawal," ungkap Kurniasih.

“Akibat data cleansing banyak yang curhat ke saya saat reses. Ada tukang pisang goreng, ada tukang bakso yang tadinya masuk ke PBI kena data cleansing akhirnya tidak masuk. Anggaran kesehatan ini jika dimaksimalkan untuk rakyat tidak mampu pasti lebih bermanfaat,”

**Dr. Hj. KURNIASIH
MUFIDAYATI, M.Si.**

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI



Kecolongan Lagi di Kasus GGAPA, Wakil Ketua FPKS Kembali Suarakan Pembentukan TGIPF

Ketua DPP PKS ini juga meminta agar lembaga pemerintah yang berwenang tidak lepas tangan dan berani untuk bertanggung jawab. "Lembaga pemerintah yang berwenang tidak boleh lepas tanggung jawab. Bukankah lembaga terkait sudah dibekali tupoksi dan anggaran untuk mencegah hal semacam itu terjadi?" tambahnya.

"Ditemukannya kasus baru ini menandakan pemerintah kecolongan. Bahwa selama ini penanganan serta pengusutan kasus tersebut belum sampai ke akar-akarnya. Jika memang penyebab kasus baru ini adalah cemaran obat lagi, maka kita tidak bisa membayangkan berapa banyak obat tercemar yang beredar," kata Netty dalam keterangan media, Kamis, (09/02).

Politisi PKS asal Jawa Barat ini sejak awal sudah meminta pemerintah untuk membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) untuk mengusut secara tuntas kasus gangguan ginjal akut.

Netty menyebut harus ada evaluasi menyeluruh dan tuntas, baik dari sisi pengawasan obat maupun fungsi lembaga-lembaga terkait.

"Evaluasi menyeluruh ini mendesak dilakukan agar

tidak ada lagi kasus serupa yang menelan korban. Bisa jadi ada kesalahan sistemik yang harus segera dibenahi terkait peredaran obat tersebut," katanya.

Ketua DPP PKS ini juga meminta agar lembaga pemerintah yang berwenang

tidak lepas tangan dan berani untuk bertanggung jawab.

"Lembaga pemerintah yang berwenang tidak boleh lepas tanggung jawab. Bukankah lembaga terkait sudah dibekali tupoksi dan anggaran untuk mencegah hal semacam itu terjadi?" tambahnya.

Sementara itu, Polri kata Netty harus menuntaskan penyelidikan secara transparan dan akurat.

"Tuntaskan penyelidikan, jangan setengah-setengah, dan bongkar sampai ke akar-akarnya. Jika ditemukan pelanggaran, maka harus diproses dan ditindak sesuai hukum," kata Netty.

“Ditemukannya kasus baru ini menandakan pemerintah kecolongan. Bahwa selama ini penanganan serta pengusutan kasus tersebut belum sampai ke akar-akarnya. Jika memang penyebab kasus baru ini adalah cemaran obat lagi, maka kita tidak bisa membayangkan berapa banyak obat tercemar yang beredar,”

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI



Kondisi Ekonomi Indonesia, Aleg PKS: Pertumbuhan dan Kualitas Harus Berjalan Beriringan

Jakarta (09/02) --- BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 5,3 persen (yoy). Berbagai komentar pun muncul, ada yang mengapresiasi dan ada pula yang menilai pencapaian tersebut masih rendah. Mengingat, Vietnam dan Filipina masing-masing dapat tumbuh 8,02 persen dan 7,60 persen, atau di atas capaian Indonesia.

Anggota Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menilai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia belum dibarengi dengan kualitas yang memadai. Indikator seperti kemiskinan dan pengangguran menunjukkan hal ini.

Berdasarkan rilis (BPS), jumlah penduduk miskin justru meningkat pada September 2022 menjadi 26,36 juta orang, atau naik sekitar 200 ribu orang dibandingkan Maret 2022.

"Kenaikan penduduk miskin bahkan terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Secara persentase, penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen. Tentu, kondisi ini semakin jauh dari target RPJMN 2020-2024 sebesar 7 persen," ungkapnya.

Ecky menjelaskan, selain angka penduduk miskin, kita juga bisa melihat perkembangan sektor

ketenagakerjaan. Tidak jauh berbeda dengan kemiskinan, sektor ketenagakerjaan juga belum jua membaik.

Ecky mengutip data BPS dimana sebelum pandemi, jumlah pengangguran terbuka mencapai 6,93 juta (Februari

2020). Angka tersebut mencakup 4,94 persen dari jumlah tenaga kerja.

Selang beberapa waktu, jumlah pengangguran terbuka melonjak cukup besar hampir 1,5 juta.

"Kalau kita lihat, jumlah pengangguran sebelum pandemi mencapai 6,93 juta jiwa dan kemudian naik menjadi 8,42 juta jiwa pada Agustus 2022. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana mungkin pertumbuhan dapat dikatakan berkualitas jika pada saat yang bersamaan kemiskinan dan pengangguran terus naik", jelas Ecky.

"Ke depan, kita perlu membangun narasi-narasi yang fokus kualitas pertumbuhan." tutup Ecky.

“Kalau kita lihat, jumlah pengangguran sebelum pandemi mencapai 6,93 juta jiwa dan kemudian naik menjadi 8,42 juta jiwa pada Agustus 2022. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana mungkin pertumbuhan dapat dikatakan berkualitas jika pada saat yang bersamaan kemiskinan dan pengangguran terus naik”

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI



Legislator PKS: Kemiskinan Sinyal Negara Belum Mengurus Warganya Sesuai UUD NRI 1945

Jakarta (05/02) — Tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%).

Hal ini menjadi sorotan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati. Ia menyampaikannya di Jakarta pada Kamis (02/02/2023).

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa kemiskinan mendapatkan perhatian secara fundamental dari negara. Pada pasal 34 Ayat 1-4 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat

yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3) Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam UU no.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, juga disebutkan bahwa : 1) Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan

dasar setiap warga negara. 2) Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menilai bahwa pengurangan angka kemiskinan cenderung stagnan.

Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin pada September 2022 yaitu sebesar 26,36 juta orang atau setara dengan 9,57 persen. Angka ini menunjukkan

peningkatan sebesar 0,20 juta orang atau 0,03 persen terhadap Maret 2022. Jika dibandingkan dengan September tahun 2017, jumlah penduduk miskin sebesar 26,58 juta orang setara dengan 10,12%.

"Artinya perubahannya hanya sekitar 220 ribu saja, angkanya tidak terlalu signifikan," ungkap Anis.

Anis juga menyoroti program pengentasan kemiskinan yang tidak terpusat pada satu lembaga dan tidak memiliki data yang valid.

"Program pengentasan kemiskinan tidak terpusat pada satu lembaga yang setara dengan kementerian atau lembaga khusus yang langsung dipimpin oleh Presiden. Hal ini berdampak terhadap proses koordinasi dan pencapaian target pengurangan angka kemiskinan," papar Anis.

Persoalan data juga masih menjadi persoalan mendasar

yang dihadapi dalam memberikan bantuan atau penyaluran program.

"Masih banyak terdapat exclusion error dan inclusion error dalam data perlindungan sosial sehingga tidak tepat sasaran," tegasnya.

Lebih lanjut Anis menjelaskan bahwa kemiskinan didominasi oleh persoalan struktural.

"Adanya struktur sosial masyarakat yang tidak memiliki akses atau mobilitas vertikal untuk menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata, menjadi persoalan tersendiri," katanya.

Kelompok ini terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah pribadi atau petani dengan kepemilikan lahan yang kecil sehingga hasilnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, buruh yang tidak memiliki skill atau keahlian yang dikenal dengan sebutan unskilled labour.

"Program pengentasan kemiskinan tidak terpusat pada satu lembaga yang setara dengan kementerian atau lembaga khusus yang langsung dipimpin oleh Presiden. Hal ini berdampak terhadap proses koordinasi dan pencapaian target pengurangan angka kemiskinan,"

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI



Live
Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



BERSAMA ARI PUTRA UTAMA



Saksikan
Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



FPKS Tolak RUU Kesehatan Disahkan karena Tidak Matang dan Masih Terjadi Kekosongan Hukum

Jakarta (07/02) --- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, membacakan pandangan mini Fraksi PKS pada Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan atas penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan, Selasa, (07/02/2023).

Menurut Ledia, Sebagai salah satu upaya mewujudkan amanat konstitusi, pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya untuk menjamin akses kesehatan yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan," jelas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Penyusunan RUU tentang Kesehatan yang dibahas dengan metode omnibus law, imbuhnya, mewajibkan harus dilakukan secara menyeluruh, teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait sehingga tidak ada pengaturan yang luput, kontradiksi, dan bahkan baru diundangkan sudah diuji ke MK atau tidak lama kemudian harus direvisi atau bahkan menimbulkan kontroversi polemik yang berlarut-larut.

"Penyusunan RUU tentang Kesehatan seharusnya mencakup seluruh perbaikan dalam sistem kesehatan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ungkapnya.

Ledia menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi catatan Fraksi PKS terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan.

"Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa negara

berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat yaitu mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, perbaikan layanan kesehatan yang berkualitas harus menjadi prioritas dalam penyusunan draft RUU Kesehatan ini sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tegas Anggota Komisi X ini.

Kedua, lanjut Ledia, Fraksi PKS berpendapat bahwa penyusunan RUU Kesehatan yang dibahas dengan metode omnibus ini tidak boleh menyebabkan kekosongan pengaturan, kontradiksi pengaturan, dan juga harus memastikan partisipasi bermakna dalam penyusunan, mengingat banyaknya Undang-Undang yang akan terdampak dalam penyusunan RUU tentang

BERIKUTNYA >>>

"Disamping itu, sebelum draft RUU Kesehatan ini diputuskan sebagai draft RUU inisiatif DPR RI, sebaiknya harus dilakukan konfirmasi ulang kepada 26 pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dalam RDPU di Baleg DPR RI, apakah hasil penyusunan draft RUU Kesehatan ini sudah sesuai dengan berbagai masukan mereka?"

FPKS Tolak RUU Kesehatan Disahkan ...

« SEBELUMNYA

Kesehatan ini.

"Disamping itu, sebelum draft RUU Kesehatan ini diputuskan sebagai draft RUU inisiatif DPR RI, sebaiknya harus dilakukan konfirmasi ulang kepada 26 pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dalam RDPU di Baleg DPR RI, apakah hasil penyusunan draft RUU Kesehatan ini sudah sesuai dengan berbagai masukan mereka?" tanya Ledia.

Ketiga, imbuh Ledia, Fraksi PKS berpendapat bahwa ada pengaturan dalam beberapa UU yang dihapuskan dalam draft RUU Kesehatan ini. Sehingga, hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum.

"Antara lain, dihapuskannya aturan mengenai SIPB bidan, yang dalam RUU ini hanya dinyatakan akan diatur dalam peraturan pemerintah, juga dihapuskannya mengenai praktik kebidanan yang mengatur tempat praktik dan jumlahnya sesuai dengan tingkat pendidikan bidan," pungkasknya.

Keempat, tambah Ledia,

Fraksi PKS berpendapat bahwa penugasan pemerintah kepada BPJS yang merupakan badan hukum publik yang bersifat independen harus disertai kewajiban pemerintah dan pendanaannya.

"Kelima, Fraksi PKS berpendapat bahwa ada kerawanan dalam draft RUU Kesehatan pasal 236 mengenai tenaga medis dan tenaga Kesehatan warga negara asing dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi atau non investasi," ujarnya.

Kerawanan ini, kata Ledia, terkait dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia yang sangat mungkin tersingkirkan atas nama investasi atau alih teknologi.

Keenam, imbuh Ledia, Fraksi PKS berpendapat bahwa di semua negara pengaturan tentang profesi kesehatan diatur dalam UU tersendiri.

"Oleh karena itu, seharusnya draft RUU Kesehatan ini tidak menghapus materi pengaturan profesi-profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan," sebut Ledia.

Ketujuh, ujar Ledia, Fraksi PKS berpendapat bahwa anggaran kesehatan harus dialokasikan secara memadai untuk memastikan bahwa negara memberi layanan kesehatan berkualitas yang aksesibel bagi masyarakat Indonesia.

"Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan diatas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapakan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan **MENOLAK** draft Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan untuk dibahas pada tahap selanjutnya," tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I ini.



"Penyusunan RUU tentang Kesehatan seharusnya mencakup seluruh perbaikan dalam sistem kesehatan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Badan Legislasi DPR RI



H. Johan Rosihan, S.T

Pertemuan dengan Anggota Majelis Syuro Arab Saudi



Jakarta (03/02) --- Anggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Arab Saudi, dari Fraksi PKS Johan Rosihan bersama sejumlah Anggota GKSB Arab Saudi melakukan pertemuan dengan Anggota Majelis Syuro Arab Saudi dalam rangka memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama Indonesia-Arab Saudi.

Kunjungan GKSB DPR RI diterima oleh Syaikh Osama yang merupakan Ketua Komisi Persahabatan Majelis Syuro Arab Saudi bertempat di kantor Majelis Syuro Arab Saudi, di Riyadh Kamis, (02/02/2023).

Pada pertemuan tersebut, Johan Rosihan bersama GKSB DPR RI Arab Saudi secara resmi mengundang para investor Arab Saudi untuk bersama-sama membangun peternakan di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), melalui pertemuan GKSB DPR dengan Komisi Persahabatan Majelis Syuro Arab Saudi diharapkan kerjasama kedua negara semakin kuat terutama sektor peternakan sebagai salah satu sektor unggulan yang berperan membangkitkan perekonomian kedua negara.

Diketahui, kerjasama Indonesia dan Arab Saudi telah berlangsung lama dalam berbagai bidang sehingga GKSB DPR menekankan pentingnya

kedua negara meningkatkan kerja sama di bidang investasi peternakan mengingat potensi peternakan di Pulau Sumbawa NTB sangat menjanjikan karena daya dukung alam, sosial budaya dan kearifan lokal.

"Kami mengundang para investor Arab Saudi untuk bekerja sama membangun

peternakan di Pulau Sumbawa NTB melalui berbagai skema investasi terutama memperkuat infrastruktur peternakan yang lebih maju dan modern dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak," ungkap Johan yang merupakan legislator yang berasal dari dapil NTB 1 Pulau Sumbawa.

Johan menambahkan bahwa diperlukan penguatan kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi, tidak hanya berfokus pada urusan haji dan umroh namun perlu diperkuat kerjasama ekonomi dalam bidang pertanian, pangan, peternakan, kelautan dan perikanan.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id

”Perlu penguatan promosi investasi Arab Saudi untuk pengembangan infrastruktur peternakan di Indonesia serta investasi produk olahan industri peternakan mengingat investasi pada sektor pangan sangat erat kaitannya dengan pengembangan produk halal agar menjadi trend setter pangan dunia”

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota GKSB DPR RI



Hadiri Haul Guru Sekumpul ke-18, Habib Aboe: Doa Untuk Keselamatan Bangsa



Pada haul ini pula, kata Habib Aboe, masyarakat diajak berdzikir kepada Allah SWT, sehingga diharapkan akan bisa memberikan kekuatan spiritual menghadapi situasi ketidakpastian di tahun ini.

Jakarta (29/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy menghadiri Haul guru sekumpul ke 18 di Martapura Kalimantan Selatan, Ahad, (29/01).

"Haul ini sangat penting untuk masyarakat, utamanya untuk menghadapi tahun 2023 yang diramalkan akan terjadi krisis. Bahkan Kepala BIN menyampaikan bahwa Foresight dari intelijen dunia itu menggambarkan tahun 2023 sebagai tahun yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Istilah intelijen disebut dengan winter is coming," ungkap Sekjen DPP PKS ini.

Melalui haul Guru Sekumpul ini, imbuhnya, kita akan berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara.

"Kita doakan juga semoga bangsa Indonesia akan terhindar dari berbagai mara bahaya, serta bisa melalui berbagai tantangan di tahun 2023 ini," ujar Anggota Komisi III ini.

Pada haul ini pula, kata Habib Aboe, masyarakat diajak berdzikir kepada Allah SWT,

sehingga diharapkan akan bisa memberikan kekuatan spiritual menghadapi situasi ketidakpastian di tahun ini.

"Insha Allah dengan doa dan dzikir yang dipanjatkan akan dapat menguatkan mental masyarakat bila prediksi adanya krisis dan kegelapan benar benar terjadi," ujarnya.

Selain dari sisi ruhiyah, lanjut Habib Aboe, haul guru sekumpul ini menguatkan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Terlihat

solidaritas dan kesetiakawanan sosial nyata terbangun di tengah masyarakat selama perhelatan haul.

"Masyarakat banyak mendirikan posko dan layanan lain untuk saling bantu membantu para jemaah dari luar kota yang datang berbondong-bondong. Hal ini sangat membantu integrasi sosial buat bangsa dan negara," terang Bendahara Fraksi PKS ini.

"Secara khusus saya minta kepada Polda Kalsel untuk melakukan pengamanan secara maksimal, termasuk rekayasa lalu lintas yang baik. Sehingga jemaah bisa hadir dengan aman dan nyaman," pungkasnya.

Masyarakat banyak mendirikan posko dan layanan lain untuk saling bantu membantu para jemaah dari luar kota yang datang berbondong-bondong. Hal ini sangat membantu integrasi sosial buat bangsa dan negara

HABIB ABOE BAKAR ALHABSY

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I



Kurniasih Resmikan TKM Tempat Ngopi Menyatu dengan Masjid di Dapil

Jakarta (09/02) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meresmikan unit usaha program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tempat Ngopi yang berlokasi di halaman Masjid Al Ihsan Patal Senayan, Jakarta Selatan.

Kurniasih mengapresiasi lahirnya UMKM baru 'Tempat Ngopi' yang bersinergi dengan DKM Masjid Al Ihsan. Hal ini akan menjadi nilai tambah bagi masjid yang berfungsi bukan hanya tempat ibadah tapi juga menjawab problematika umat.

"Salah satu persoalan yang ingin diselesaikan dengan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) adalah berkurangnya angka pengangguran serta lahirnya wirausaha baru. Kolaborasi program ini dengan DKM Masjid menunjukkan jiwa masjid juga bisa menjadi solusi bagi persoalan ekonomi masyarakat, ini bisa dicontoh daerah lain," ujar Kurniasih dalam paparannya.

TKM adalah usaha yang

dijalankan secara berkelompok. Sehingga dengan pengelolaan yang baik dan profesional, harapannya semakin banyak orang bisa mendapatkan manfaat secara ekonomi.

"Ini adalah usaha atau bisnis meskipun skalanya UMKM. Pesan kami harapannya tetap dikelola secara

profesional sebab jika baik pengelolaannya saya yakin usahanya bisa maju dan berkembang sehingga bermanfaat bagi semua anggotanya," ungkap Kurniasih.

Kurniasih pun berharap dengan adanya 'Tempat Ngopi' di Masjid Al Ihsan semakin bisa memakmurkan masjid dan bisa memberikan alternatif tempat istirahat setelah beribadah di Tempat Ngopi.

"Jadi sambil mampir atau ibadah di Masjid bisa mampir ya untuk menikmati sajian kopi dan menu lainnya, saya tadi merasakan dan recommended sekali," sebut Kurniasih.

"Ini adalah usaha atau bisnis meskipun skalanya UMKM. Pesan kami harapannya tetap dikelola secara profesional sebab jika baik pengelolaannya saya yakin usahanya bisa maju dan berkembang sehingga bermanfaat bagi semua anggotanya,"

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI





Roadshow di Solok Selatan Hermanto Serahkan Berbagai Bantuan ke Petani



Kabupaten Solok Selatan (30/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbang I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Solok Selatan melakukan roadshow menyerahkan beragam bantuan pemerintah untuk petani, pembudidaya ikan dan masyarakat sekitar hutan

Bantuan yang diserahkan itu berupa kendaraan roda tiga (bentor), cultivator, unit pengolahan pupuk organik (UPPO), jalan usaha tani (JUT), irigasi tersier, ayam, pekarangan pangan lestari (P2L), mesin pembuat pakan ikan dan Kebun Bibit Rakyat (KBR).

"Dana pengadaan berbagai jenis alsintan ini berasal dari negara. Ini berarti, kelompok penerima bantuan dipercaya untuk menjalankan tugas negara. Jalankan tugas ini sebaik-baiknya," ujar Hermanto dalam sambutannya pada kegiatan penyerahan bantuan tersebut belum lama ini.

Hermanto minta agar bantuan yang diterima tersebut dikelola dengan sungguh-sungguh.

"Bantuan tersebut jangan dianggap sebagai hibah tapi anggaplah sebagai modal. Modal, kalau dikelola secara sungguh-sungguh maka secara bertahap akan berkembang", papar legislator dari FPKS DPR RI ini.

"Kalau sudah berkembang maka saat itulah penerima bisa menikmati hasilnya berupa tambahan kesejahteraan", pungkas legislator dari Komisi IV DPR RI ini.

Dalam roadshow penyerahan bantuan di Kabupaten Solok Selatan tersebut Hermanto didampingi tokoh muda setempat Effendi Muharram.

Kelompok-kelompok yang beruntung menerima bantuan adalah sebagai berikut:

1. penerima bentor: Poktan Mata Air Makmur (Jorong Bukit Malintang, Lubuk Gadang);
2. penerima cultivator: Poktan Tunas Baru dan Poktan Sinar

- Muda (Nagari Pakan Rabaa Utara);
 3. penerima UPPO: Poktan Koto Rambah Sepakat (Jorong Koto Rambah, Nagari Lubuk Gadang Utara) dan Poktan Pemuda Masa Depan (Jorong Janjang Kambang, Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo);
 4. penerima JUT: Poktan Sungai Kapur Indah (Jorong Sungai Kapur, Nagari Pakan Rabaa);
 5. penerima irigasi tersier: Poktan Makmur (Jorong Baru Lambai, Nagari Pakan Rabaa);
 6. penerima ayam: KWT Kataping Sakti (Jorong Malus Nagari Lubuk Gadang Timur), KWT Kamboja (Jorong Koto Kaciak, Nagari Pasir Talang) dan Wanita Mandiri (Jorong Sungai Kapur, Pakan Rabaa);
 7. penerima P2L: KWT An Nur dan KWT Al Muazzah (Nagari Koto Baru);
 8. penerima mesin pembuat pakan ikan: Pokdakan Batang Tarap (Jorong Bariang Kampung Dalam, Nagari Lubuk Gadang Utara);
- Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id

Bantuan tersebut jangan dianggap sebagai hibah tapi anggaplah sebagai modal. Modal, kalau dikelola secara sungguh-sungguh maka secara bertahap akan berkembang

Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I



Hanya FPKS Tolak RUU
Kesehatan Jadi Inisiatif DPR

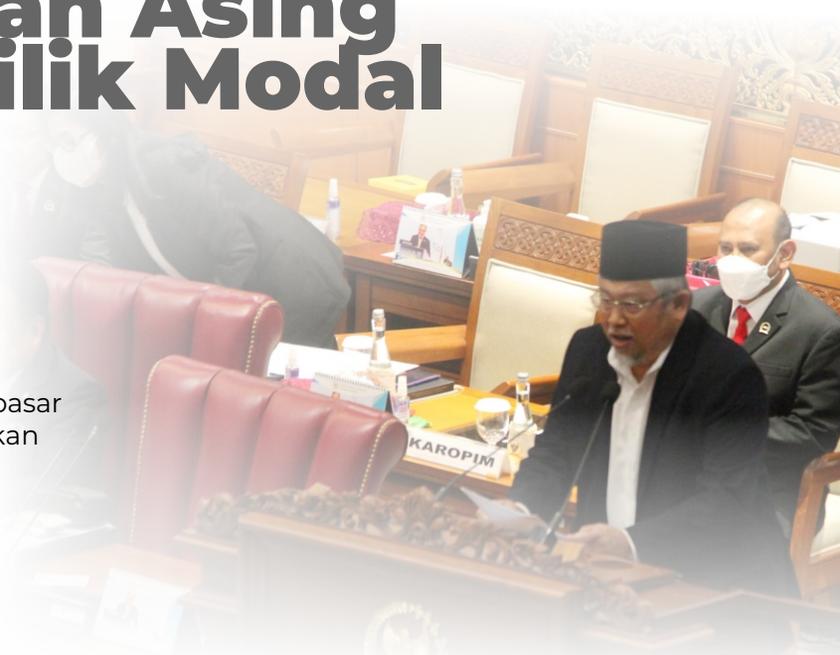
Pengelolaan Kesehatan Untungkan Asing dan Pemilik Modal

”

RUU berpotensi mengarahkan pengelolaan kesehatan rakyat Indonesia kepada mekanisme pasar yang cenderung menguntungkan pemilik modal

H. ANSORY SIREGAR, Lc,

Anggota Badan Legislasi DPR RI





Salurkan Advokasi PSBI,

Anis Byarwati: Semoga Terus Bermanfaat untuk Kebaikan



Jakarta (31/01) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jakarta Timur Anis Byarwati menyerahkan bantuan advokasi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Non Ekonomi kepada 17 lembaga Pendidikan diantaranya lembaga Anak Usia Dini (PAUD), TPQ, RA, dan Rumah Quran, di ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI Senayan Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Anis menyampaikan terimakasih atas kehadiran dan silaturahmi dari para perwakilan lembaga tersebut dalam Hari Aspirasi Fraksi PKS DPR RI.

Menurut Anis acara ini merupakan ta'aruf dan silaturahmi dalam membangun kebersamaan. Anis juga mengungkapkan bahwa senantiasa selalu memantau perkembangan ajuan advokasi baik dibidang ekonomi maupun non ekonomi dari Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang merupakan mitra dari Komisi XI DPR RI.

"Saya diamanahkan PKS ada di komisi XI yang membidangi keuangan dengan mengawal perekonomian pemerintah saat ini, termasuk dalam mengadvokasi program ini. Tugas yang tidak ringan, untuk itu mohon doanya agar diberikan kelancaran," ungkap Anis yang merupakan

memang cukup panjang hingga akhirnya bantuan tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Perlu disiapkan proposal terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Bank Indonesia.

Anis yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menegaskan, "Kami menyampaikan kepada yang belum cair ajuannya sampai saat ini, agar bersabar, akan kami perjuangkan terus in sya Allah," tegas Anis.

Dalam kesempatan yang sama para penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya kepada Anis, diantaranya, Ketua RT sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Furqon Penggilingan Cakung, Muhammad Yunus mengucapkan rasa terimakasih atas support dan advokasi dari Anis Byarwati.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id

Anggota Komisi XI DPR RI.

Terkait dengan apa yang diadvokasi ini, lanjut Anis memberikan penjelasan, "Program yang berkaitan dengan komisi saya sudah berjalan sejak tahun 2019. Saat ini bantuan non ekonomi sudah mulai berjalan dengan bekerja sama dengan PAUD dan lembaga pendidikan lainnya yang ada di Jakarta Timur," sebut Anis.

Perjuangannya, kata Anis,

Saya diamanahkan PKS ada di komisi XI yang membidangi keuangan dengan mengawal perekonomian pemerintah hingga saat ini, termasuk dalam mengadvokasi program ini. Tugas yang tidak ringan, untuk itu mohon doanya agar diberikan kelancaran,"

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI



Awal Tahun 2023, Nevi Zuairina Lanjutkan Kegiatan Rutin Berbagi Paket Sembako



Kab. Pasaman Barat (31/01) --- Pembagian paket sembako terus dilanjutkan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina pada tahun 2023 ini. Pembagian pada akhir Januari ini dilakukan pada kampung - kampung di Mahakarya, Pasaman Barat.

"Saya bertekad akan melanjutkan pembagian sembako yang sudah dirintis sejak dilantik jadi Anggota DPR pada tahun 2019 silam. Ini merupakan kegiatan rutin dan Alhamdulillah masyarakat menerima dengan baik program sembako yang selama ini telah berjalan," tutur Nevi.

Legislator yang duduk di Komisi VI ini menguraikan, bahwa menyusuri kampung-kampung bertemu warga masyarakat memiliki tantangan dan keunikan tersendiri.

"Semua informasi, aspirasi dan keluhan dapat langsung didapat dari sumbernya, sehingga menjadi catatan khusus baginya untuk dijadikan bahan yang akan disampaikan pada persidangan," ungkapnya.

Nevi mengatakan, Silaturahmi ini selain berbagi sembako, dialog informal ia lakukan untuk menggali semua hal yang ada di masyarakat sehingga nantinya dapat dijadikan evaluasi kepada mitra kerja DPR dari pihak pemerintah.

2023 ini, ia akan merencanakan pada daerah-daerah yang belum pernah ia kunjungi, kecuali ada kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana atau daerah yang mengalami gagal panen atau puso.

Tentunya ia berharap, di Indonesia pada umumnya, atau di dapilnya pada khususnya, tidak ada lagi bencana alam yang berdampak besar pada masyarakat.

"Semoga, tahun 2023 ini menjadi titik balik keterpurukan bangsa Indonesia yang banyak mengalami ujian dan cobaan mulai dari pandemi hingga bencana alam. Masyarakat Indonesia dapat pulih bangkit secara ekonomi, dan pengangguran semakin berkurang dari waktu ke waktu. Pembagian sembako ini, doakan agar saya selalu konsisten, untuk menyapa seluruh warga Sumbar, terutama di dapil II," tutup Nevi dalam dialog dengan warga.

Karena menurutnya, selain fungsi penganggaran negara dan legislasi, fungsi pengawasan selain di Komisi juga dapat dilakukan pada daerah pemilihan.

"Hampir setiap daerah pemilihan DPR RI yang tersebar di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Untuk bertemu dengan masyarakat, perlu berbaur tanpa sekat sehingga dialog yang dilakukan dapat lepas, bebas tanpa sekat," ungkap Nevi.

Politisi PKS ini menambahkan, untuk pembagian sembako di tahun

"Hampir setiap daerah pemilihan DPR RI yang tersebar di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Untuk bertemu dengan masyarakat, perlu berbaur tanpa sekat sehingga dialog yang dilakukan dapat lepas, bebas tanpa sekat

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II



Hadiri Latansa di Dapil, Diah Nurwitasari Ajak Emak-Emak PKS Bahagia



Bandung (10/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS dari Dapil Jabar II, Diah Nurwitasari, menghadiri Latihan Perempuan Siaga (Latansa) yang diselenggarakan oleh DPD PKS Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Lazuardy Syariah Park, Kecamatan Cisarua KBB.

Menurut Diah Nurwitasari acara yang diikuti sekitar 320 anggota perempuan PKS ini merupakan kegiatan rutin tahunan sebagai ajang silaturahmi dan refreshing.

"Ini adalah program rutin untuk anggota perempuan PKS. Alhamdulillah hari ini hadir 320 perempuan PKS sebagai peserta Latansa DPD PKS KBB, ini baru sebagiannya yang ikut. Ini adalah sarana untuk mempererat persaudaraan sekaligus hiburan outdoor buat para emak-emak PKS yang setiap harinya beraktifitas mengurus rumah tangga dan bekerja di masyarakat," tutur Aleg Perempuan Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Kegiatan ini pun merupakan sarana untuk konsolidasi dan penambah wawasan.

"Latansa ini didesain juga sebagai sarana untuk menambah wawasan anggota perempuan PKS, baik itu wawasan kebangsaan maupun wawasan keorganisasian yang diharapkan mampu menjadi

bekal bagi para emak-emak ini untuk berkontribusi dalam berkhidmat di masyarakat." Imbuh Diah, yang juga diamanahi menjadi Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS ini.

Diah pun berharap acara ini berefek positif baik secara personal maupun secara organisasi.

"Saya harap setelah mengikuti acara ini, para perempuan PKS ini menjadi lebih bahagia, karena jika para

emak ini bahagia akan membawa suasana dan aura positif bagi keluarganya dan bagi masyarakat di sekitarnya. Saya pun ingin menghaturkan salam hormat dan salut kepada para suami dan anak-anaknya yang rela ditinggalkan emak-emaknya sejenak untuk refreshing dan training di acara ini," pungkas Diah penuh harapan.

Acara ini pun dihadiri Ketua DPD PKS KBB, Acep Hud Syalahudin. Dalam sambutannya Acep Hud menambahkan acara ini adalah apel pemenangan.

"Kami berharap acara yang diikuti oleh anggota pelopor perempuan PKS KBB ini merupakan apel siaga pemenangan, untuk menyambut pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang," tutup Acep Hud menegaskan.

"Saya harap setelah mengikuti acara ini, para perempuan PKS ini menjadi lebih bahagia, karena jika para emak ini bahagia akan membawa suasana dan aura positif bagi keluarganya dan bagi masyarakat di sekitarnya

Dipl.Ing. Hj. **DAIH NURWITASARI**, M. I. POL.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II



Aleg PKS Dukung KLHK Tertibkan Tambang Batubara Yang Merusak



Jakarta (28/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, bersama rombongan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, meninjau aktivitas tambang batubara yang diduga telah merusak lingkungan.

Akmal menerangkan, bahwa Komisi IV DPR RI bersama dengan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menertibkan kawasan tambang batu bara yang izinnya dipegang oleh PT Mulia Persada Kartanegara, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan ini telah beroperasi di kawasan hutan tanpa izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang berlaku.

“Kami menerima laporan dan aspirasi dari berbagai komunitas masyarakat akan terjadinya gangguan lingkungan akibat aktivitas tambang. Gangguan ini sampai mempengaruhi kualitas hidup masyarakat karena sudah menurunkan kualitas air dan membuat jalan berlubang”, tutur Akmal.

Politisi PKS ini menyesalkan, bahwa eksploitasi tambang batu bara telah yang merusak lingkungan dan ekosistem alam, dan pastinya merugikan negara. Ia

menjelaskan bahwa perlunya turun tangan negara untuk menghukum setegas-tegasnya.

“Keluhan masyarakat, seperti sumber air yang bermasalah, jalan yang berlubang dan berbahaya buat masyarakat. Kita mendorong kepada pemerintah agar dengan tegas menindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, memberikan ruang lingkup pemerintah dan aparatnya untuk melakukan penertiban dan penindakan secara perdata maupun pidana,” Tegas Andi Akmal.

“Keluhan masyarakat, seperti sumber air yang bermasalah, jalan yang berlubang dan berbahaya buat masyarakat. Kita mendorong kepada pemerintah agar dengan tegas menindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pria kelahiran Bone ini memastikan, akan terus mendorong komisi IV dan pemerintah untuk mengawal proses hukum yang berlaku. Masyarakat mesti mendapat perlindungan sehingga diperlukan kehadiran negara untuk menjamin hak-hak masyarakat yang tidak mampu mereka dapatkan jika pemerintah tidak turun tangan.

“Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti kasus ini melalui rapat kerja gabungan dengan seluruh instrumen terkait. Tentu saja, sekaligus menginventarisir dan mengusulkan penyelesaian terhadap tambang di kawasan hutan yang belum ada izinnya. Intinya, Komisi IV mendorong pemerintah agar dengan tegas menindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Lingkungan dan Kehutan,” tutup Andi Akmal Pasluddin.

**DR. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan **ASPIRASI ANDA** **DI HARI ASPIRASI** **FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>



Terima Kunjungan Siswa SMPIT dari Sukabumi, Slamet Ajak Peduli Politik Sejak Dini

Slamet menyampaikan bahwa sebagai generasi muda, kita perlu untuk aktif di dalam berbagai kegiatan maupun organisasi yang ada di sekolah. Dengan aktif berorganisasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan positif lainnya di luar kelas membuat potensi kesuksesan lebih terbuka lebar.

Jakarta (09/02) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet memberikan pencerahan kepada para siswa-siswi SMPIT At-Takwin Sukabumi terkait keharusan bagi generasi muda untuk mulai sadar dan peduli terhadap politik sejak dini di ruang Meeting FPKS DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (09/02).

Dengan sadar akan politik sejak dini, kata Slamet, dapat membuat perspektif sosial seseorang menjadi lebih luas. Politik dapat membuat kepekaan diri terhadap lingkungan sekitar menjadi tinggi.

“Demokrasi seperti hukum rimba, yang berkuasa adalah ia yang memiliki jumlah yang paling banyak. Hal ini lah yang perlu diketahui oleh adik-adik sekalian bahwa kebijakan yang diambil oleh DPR RI bukan hanya kebijakan yang diinginkan oleh PKS saja karena jumlah suara Fraksi PKS di DPR

tidak terlalu banyak,” pungkasnya.

Kemudian, Slamet menyampaikan bahwa sebagai generasi muda, kita perlu untuk aktif di dalam berbagai kegiatan maupun organisasi yang ada di sekolah. Dengan aktif berorganisasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan positif lainnya di luar kelas membuat potensi kesuksesan lebih terbuka lebar.

“Kunci keberhasilan ada dua, yaitu kemauan dan kesempatan (datangnya dari Allah SWT). Belajar dan bergantung kepada Allah juga menjadi sangat penting untuk menjadi pribadi yang sukses dan soleh,” ujar Slamet.

“Demokrasi seperti hukum rimba, yang berkuasa adalah ia yang memiliki jumlah yang paling banyak. Hal ini lah yang perlu diketahui oleh adik-adik sekalian bahwa kebijakan yang diambil oleh DPR RI bukan hanya kebijakan yang diinginkan oleh PKS saja karena jumlah suara Fraksi PKS di DPR tidak terlalu banyak,”





Aspirasi dari Presidium Duta Peradaban, Aleg PKS: Kami Siap Berkolaborasi dengan Seluruh Elemen Bangsa

Jakarta (31/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menerima aspirasi dan kunjungan dari Presidium Duta Peradaban di Ruang Meeting Fraksi PKS DPR RI, pada Selasa (31/01).

Dalam kesempatan ini, Presidium Duta Peradaban menyatakan kesiapan mereka untuk memberi dukungan bagi kemenangan PKS dan Anies R. Baswedan di Pemilu 2024.

Menanggapi dukungan tersebut, Mardani sangat menyambut baik.

"Kami terbuka kepada seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dan mendukung Partai Keadilan Sejahtera. Kami siap untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa", ujar Mardani.

la pun menyinggung soal dukungan PKS kepada bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan.

"Saat ini, PKS sudah

menyatakan akan mendukung Pak Anies untuk maju sebagai calon presiden. Semoga perjuangan kita untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi rakyat dan negara Indonesia bisa terwujud", tambahnya lagi.

Terakhir, Mardani mendorong pengurus Presidium Duta Peradaban untuk mengajak pihak-pihak lain berkolaborasi dalam membangun bangsa.

"Mari kita sebarakan niat, nilai, dan tujuan-tujuan baik kita bagi bangsa ini ke lebih banyak orang", pungkasnya.

"Kami terbuka kepada seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dan mendukung Partai Keadilan Sejahtera. Kami siap untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa",

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I



Terima Kunjungan Siswa
SMPIT Nurul Fikri,

Jazuli: Persiapkan dan Bekali Diri Sejak Dini!



Jakarta (07/02) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menerima kunjungan sekaligus memberikan pembelajaran politik kepada SMPIT Nurul Fikri di Ruang Meeting Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (07/02).

Pembelajaran politik ini membahas seputar Fraksi PKS, fungsi-fungsi DPR dan pentingnya generasi muda untuk bisa turut andil dalam berjuang di DPR pada masa yang akan datang dengan terus belajar.

"DPR ini mempunyai tugas dan fungsi. Ada 3, yang pertama Fungsi Legislasi, dimana DPR berkaitan dalam pembuatan undang-undang. Yang kedua Fungsi Pengawasan, yaitu DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta APBN. Dan yang terakhir adalah Fungsi Budgeting (Anggaran), yang mana fungsi untuk membahas

serta memberikan persetujuan atau tidak, terhadap rancangan undang-undang mengenai APBN yang diajukan oleh presiden," ujar Jazuli.

Jazuli juga menekankan pada siswa terkait pentingnya optimis dan mempunyai semangat dalam belajar. Ia juga mengatakan bahwa siswa harus

memiliki sifat leadership sejak dini. Karena untuk menjadi DPR, tidak hanya laki-laki, perempuan juga bisa.

"Teknologi bisa membangun sekaligus membunuh generasi, oleh karena itu generasi sekarang harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Luruskan niat agar berkah dalam belajar, hidup harus memiliki planning ke depan. tidak semua harus menjadi DPR, Menteri. yang penting bisa memberikan manfaat kepada banyak orang," pungkas Jazuli.

“Teknologi bisa membangun sekaligus membunuh generasi, oleh karena itu generasi sekarang harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Luruskan niat agar berkah dalam belajar, hidup harus memiliki planning ke depan. tidak semua harus menjadi DPR, Menteri. yang penting bisa memberikan manfaat kepada banyak orang,”

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Terima Kunjungan Mahasiswa, Jazuli Ajak Generasi Muda Suarakan Aspirasi



Jakarta (07/02) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini memberikan Pembelajaran Politik kepada Mahasiswa dari program studi administrasi negara Universitas Serang Raya di ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Jakarta, (07/02).

Pembelajaran politik membahas terkait Fraksi PKS dan sistem politik di Indonesia. Salah satunya adalah fungsi-fungsi DPR dan pentingnya anak-anak muda untuk bisa berjuang di DPR di masa mendatang dengan terus belajar.

"Kalian adalah masa depan bangsa ini. Karena itu, teman-teman harus mempersiapkan diri untuk mengelola negara ini dengan berbagai macam level ataupun bidangnya. Oleh karena itu, harus semangat belajar. Yang terpenting adalah iman dan ilmunya," ujar Anggota DPR dari Dapil Banten II ini.

Jazuli menekankan pentingnya untuk tidak berhenti belajar. Ilmu administrasi tidak melulu harus bekerja di bidang administrasi. Ilmu tersebut dapat digunakan di bidang lain, bahkan bisa jadi anggota legislatif sekalipun.

"Semoga kalian bisa expert di administrasi. Tidak harus kerja di administrasi. Tidak ada urusan. Ilmu di perkuliahan harus dikembangkan oleh kalian.

Upgrade kemampuan kalian, dan semangat untuk menuntaskan kuliah kalau bisa sampai S1, S2, dan S3," pungkas Jazuli.

Sesi pertanyaan dibuka dengan pertanyaan dari mahasiswa terkait fraksi dan fungsinya. Jawaban disampaikan oleh Jazuli, yaitu fungsi fraksi sebagai perpanjangan tangan dari partai dan merupakan suatu aturan dari undang-undang untuk membentuk suatu fraksi.

"Fraksi merupakan perpanjangan tangan dari partai politik di DPR RI. Fraksi

dibentuk berdasarkan undang-undang. Fraksi dibentuk untuk melakukan koordinasi kepada pimpinan DPR dan memastikan konsistensi dari suara anggota legislatif".

Jazuli juga menjawab pertanyaan terkait bagaimana aspirasi dari masyarakat dapat disalurkan ke DPR RI. Salah satunya melalui kegiatan aspirasi seperti hari ini. Jazuli menegaskan tidak boleh ada hambatan untuk bisa menemui perwakilan Fraksi PKS di DPR RI.

"PKS terbuka setiap Selasa dan Jum'at untuk membuka ruang aspirasi seperti ini. PKS selalu menerima segala aspirasi secara terbuka dengan sangat mudah tanpa ada hambatan. Akan saya tegur siapapun yang menghambat aspirasi disampaikan," tegas Jazuli.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id

"Kalian adalah masa depan bangsa ini. Karena itu, teman-teman harus mempersiapkan diri untuk mengelola negara ini dengan berbagai macam level ataupun bidangnya. Oleh karena itu, harus semangat belajar. Yang terpenting adalah iman dan ilmunya

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Terima Aspirasi dari Milenial PKS Banten, Mulyanto: Anak Muda Harus Melek Politik!

Jakarta (07/02) -- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menerima kunjungan dari generasi milenial yang tergabung dalam PKS Muda Banten di Ruang Meeting Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (07/02).

Dalam kesempatan ini, Mulyanto menyambut baik kedatangan generasi muda PKS ini

"Saya sangat senang dengan kehadiran anak-anak muda yang InsyaAllah akan menjadi pemimpin PKS sekaligus pemimpin Indonesia di masa depan", ujar Anggota DPR dari Dapil Banten III ini.

la pun berpesan agar para anak muda ini senantiasa peduli terhadap politik.

"Anak muda saat ini dikenal sebagai generasi yang apatis dan tak peduli dengan politik. Saya mengajak generasi baru PKS selalu melek politik, mengikuti perkembangan isu politik terkini, serta ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan ide dan karya terbaiknya bagi bangsa dan negara. Mengapa? Karena seluruh aspek kehidupan kita berhubungan dan dipengaruhi oleh politik", ungkap pria yang

akrab disapa Pak Mul tersebut.

Selain itu, Mulyanto berpesan agar para generasi muda PKS mampu untuk mengembangkan jiwa

kepemimpinan mereka.

"Untuk menjadi seorang pemimpin masa depan, kita harus memiliki visi besar, gagasan besar, dan kemampuan mengeksekusi gagasan tersebut. Generasi muda PKS harus mampu menjadi inisiator perubahan, sekaligus berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memajukan negara sekaligus menyejahterakan umat dan rakyat", pungkas Mulyanto.



Generasi muda PKS harus mampu menjadi inisiator perubahan, sekaligus berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memajukan negara sekaligus menyejahterakan umat dan rakyat

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI





Mengarah pada Liberalisasi
dan Lemahkan Jaminan
Kesehatan untuk Rakyat

Fraksi PKS Tolak RUU Kesehatan

Fraksi PKS berpendapat bahwa ada kerawanan dalam draft RUU Kesehatan pasal 236 mengenai tenaga medis dan tenaga Kesehatan warga negara asing dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi atau non investasi

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Badan Legislasi DPR RI





Fraksi PKS: Selamat Hari Pers Nasional, Mari Jaga Kebebasan dan Independensi Pers Nasional

Menurut Anggota DPR Dapil Banten ini, Pers adalah pilar keempat demokrasi. Maka pers punya tanggung jawab yang besar untuk mengawal kehidupan demokrasi yang bermartabat dan bertanggung jawab. Apalagi kita akan segera memasuki tahun politik 2024 yang pasti hiruk pikuk.

Jakarta (09/02) — Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers tanah air. Menurut Jazuli pers mengemban amanah besar dalam menjaga dan memajukan bangsa sejak masa kemerdekaan hingga hari ini.

Anggota Komisi I DPR ini berharap pers nasional semakin maju dan semakin terdapan dalam menghadirkan berita dan hiburan yang mendidik dan mencerdaskan bangsa.

"Kita butuh informasi. Kita butuh pengetahuan dan wawasan. Kita juga butuh hiburan. Tapi semuanya harus mencerdaskan dan mengokohkan identitas dan karakter kebangsaan," pesan Jazuli.

Menurut Anggota DPR Dapil Banten ini, Pers adalah pilar keempat demokrasi. Maka pers punya tanggung jawab yang besar untuk mengawal kehidupan demokrasi yang

bermartabat dan bertanggung jawab. Apalagi kita akan segera memasuki tahun politik 2024 yang pasti hiruk pikuk.

"Pers harus menjunjung tinggi objektivitas, adil, dan transparan. Menghadirkan berita meneduhkan suasana dan menyatukan bangsa. Menjadi saringan atau filter berita-berita hoax, SARA, dan ujaran kebencian. Jangan

tambah memperkeruh dan memanans-manasi," tandasnya.

Sebaliknya, lanjut Jazuli, pers harus berperan aktif dalam mengawal proses pergantian dan regenerasi kepemimpinan nasional sehingga lahir pemimpin yang benar-benar berintegritas dan berpihak pada rakyat.

Di sisi lain, pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus menjaga kebebasan pers dan menjaga agar pemberitaannya tetap independen.

"Kita paham banyak konglomerasi media yang dikuasai tokoh dan elit politik. Meski demikian, tidak boleh mengorbankan independensi dan objektivitas media," pungkas Jazuli.

"Pers harus menjunjung tinggi objektivitas, adil, dan transparan. Menghadirkan berita meneduhkan suasana dan menyatukan bangsa. Menjadi saringan atau filter berita-berita hoax, SARA, dan ujaran kebencian. Jangan tambah memperkeruh dan memanans-manasi,"

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Hadiri 1 Abad NU, **HNW dan Ketua PKS Jatim Kompak Apresiasi Peran NU untuk Indonesia dan Dunia**



Sidoarjo (09/02) --- Harlah 1 Abad NU disambut gegap gempita. Jutaan manusia berkumpul merayakan 100 tahun ormas Islam terbesar di seluruh dunia.

Ketua PKS Jawa Timur Irwan Setiawan hadir membersamai Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Selasa 7 Februari 2023 di GOR Sidoarjo.

Keduanya mengucapkan tahniah selamat dan memberi apresiasi atas kiprah NU dan harapan baik bagi kelanjutan kiprah positif NU untuk Umat, Indonesia dan peradaban dunia.

Ramainya pengunjung perhelatan 1 Abad NU, membuat mobil yang ditumpangi Hidayat dan Irwan terhenti. Keduanya berjalan sejauh kira-kira 1 KM menuju tempat kegiatan.

Hidayat Nur Wahid sebagai undangan VIP masuk ke dalam GOR, sementara Irwan berbaur dengan peserta lain di luar GOR.

Dalam kesempatan itu, Hidayat Nur Wahid menyampaikan bahwa kegiatan perayaan 1 Abad NU ini membuat masyarakat dapat melihat fakta bahwa Nahdlatul Ulama menghadirkan kebangkitan para ulama dan umat, yang mengundang apresiasi dari banyak pihak, baik pemerintah maupun masyarakat umum, bahkan pujian dari tokoh-tokoh internasional.

"Ini terbukti dengan diundang dan hadirnya para

ulama di kancah internasional yang membahas tentang Fiqih Peradaban. Ini menandakan bahwa kebangkitan ulama yang dicanangkan KH Hasyim Asyari, KH Wahab Hasbullah dan KH Bisri Syansuri pada satu abad yang lalu ternyata dapat terus diwujudkan, dan kita bisa menyaksikan salah satu hasilnya," kata pria yang juga menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu.

Tak hanya itu, ia menyebut Nahdlatul Ulama tak hanya berhasil menghimpun kebangkitan ulama, namun juga membangkitkan semangat umat.

"Kita bisa melihat bagaimana para Ulama

mengapresiasi dan masyarakat berbondong-bondong datang ke syukuran 1 Abad NU, meskipun berasal dari tempat yang jauh, masyaa Allah. Bangkitnya ulama selalu disertai dengan kebangkitan ummatnya," katanya mengapresiasi.

Hidayat menegaskan bahwa NU adalah gerakan yang menghadirkan nuansa Islam yang rahmat al lail alamin, yang sejuk dan bisa diterima siapa saja. Dan berharap agar prinsip positif ini akan terus menyertai NU di abad ke 2 nya.

Tak hanya Hidayat, menyaksikan secara langsung perhelatan resepsi puncak 1 Abad NU membuat Irwan takjub dengan antusiasme pengunjung yang hadir di Jawa Timur dari seluruh Indonesia.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id

Kita bisa melihat bagaimana para Ulama mengapresiasi dan masyarakat berbondong-bondong datang ke syukuran 1 Abad NU, meskipun berasal dari tempat yang jauh, masyaa Allah. Bangkitnya ulama selalu disertai dengan kebangkitan ummatnya,"

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI



Habib Aboe: Pers Harus Jadi Pilar Keempat Demokrasi Di Tahun Politik

Menurut Aboe, informasi yang handal saat ini sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Dengan memiliki asupan informasi yang baik dan benar, maka dapat menghasilkan kondisi sosial kemasyarakatan yang sehat, terlebih menjelang pemilu mendatang.

Jakarta (10/02) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, menyebut peran pers dan media sangat penting sebagai pilar keempat demokrasi, khususnya di tahun politik seperti saat ini.

"Kami sampaikan selamat Hari Pers Nasional untuk seluruh insan media. Tentunya peringatan Hari Pers Nasional tahun ini memiliki makna yang cukup penting karena menjelang tahun politik", ujar Sekjen DPP PKS ini.

Pria yang akrab disapa Habib Aboe ini menyebut, menjelang pemilihan umum biasanya kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya kerap kali bergerak dinamis, sehingga perlu diantisipasi secara bijak oleh seluruh pihak, termasuk pers.

"Tentunya, hal ini perlu diimbangi dengan kerja keras dari insan pers agar selalu bisa mempertahankan independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, akan bisa tersaji

informasi yang kredibelan berkualitas untuk masyarakat", ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/02).

Menurut Aboe, informasi yang handal saat ini sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Dengan memiliki

asupan informasi yang baik dan benar, maka dapat menghasilkan kondisi sosial kemasyarakatan yang sehat, terlebih menjelang pemilu mendatang.

"Oleh karenanya, menghadapi tahun politik ini, insan pers perlu kembali menguatkan semangat sebagai pilar keempat demokrasi. Apalagi saat ini penyebaran informasi bisa dikatakan sudah tak terbatas. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pers yang baik dan turut berperan dalam melawan kekacauan informasi maupun hoax yang mengancam kehidupan demokrasi", tegas Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan ini.

Menghadapi tahun politik ini, insan pers perlu kembali menguatkan semangat sebagai pilar keempat demokrasi. Apalagi saat ini penyebaran informasi bisa dikatakan sudah tak terbatas. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pers yang baik dan turut berperan dalam melawan kekacauan informasi maupun hoax yang mengancam kehidupan demokrasi",

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Sekjen DPP PKS

Berkaca pada Dua
Putusan Terakhir,

HNW Minta MK Konsisten Tolak Ubah Sistem Pemilu Jadi Tertutup

Jakarta (01/02) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kembali menunjukkan konsistensinya dalam memutus perkara, yakni terkait dengan permohonan judicial review sistem pemilu terbuka yang diminta untuk diubah menjadi tertutup oleh beberapa orang pemohon.

“Dalam dua putusan terakhir, seperti terkait perkawinan beda agama dan presiden dua periode tidak boleh menjadi cawapres, MK diapresiasi, karena sudah sangat tegas menolak dan konsisten menetapkan sesuai dengan ketentuan Konstitusi. Maka Saya dan banyak pihak berharap agar dalam perkara

permohonan perubahan sistem pemilu, MK melanjutkan konsisten dengan sikapnya yakni menolak permohonan untuk mengubah sistem pemilu terbuka kembali menjadi tertutup,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (01/02/2023).

Sebagai informasi, permohonan uji materi UU

Perkawinan terkait perkawinan beda agama, MK sudah berulang kali memutuskan dengan menolaknya. MK tegas dan konsisten memutuskan bahwa perkawinan beda agama tidak sejalan dengan UUD NRI 1945, karenanya ditolak. Begitu pula, terkait dengan masa jabatan presiden, MK konsisten bahwa masa jabatan maksimal dua periode dan tidak bisa diutak-atik dan diakali dengan menjadikan presiden yang sudah dua kali masa jabatan untuk diperbolehkan menjadi cawapres, sebagaimana dimintakan.

HNW sapaan akrabnya menilai bahwa putusan-putusan MK tersebut dan sikap konsistensinya perlu diapresiasi dan didukung untuk terus berlanjut, termasuk dalam sikap MK untuk konsisten dengan keputusannya sendiri yaitu sistem pemilu terbuka tidak lagi tertutup.

“Agar MK konsisten memegang prinsip konstitusi bahwa sesuai ketentuan UUDNRI 1945 Pasal 24E ayat (1) putusan MK bersifat final dan mengikat. Dan karena MK pada tahun 2008 sudah pernah memutuskan mengubah sistem pemilu dari tertutup ke sistem terbuka yang sampai sekarang masih berlaku,” ujarnya mengingatkan putusan MK yang sudah pernah dibuat sebelumnya.

Selanjutnya, jelas HNW, bahkan posisi legal dari

permohonan uji materi UU Pemilu terkait sistem pemilu terbuka tersebut juga harus dipertimbangkan sama dengan perkara-perkara sebelumnya, dimana MK sangat mementingkan memeriksa legal standing atau kedudukan hukum para pemohon.

HNW mengatakan apabila legal standing tidak terpenuhi, maka MK mestinya, sebagaimana sebelumnya, tidak segan untuk memutus bahwa permohonan itu tidak

dapat diterima. Maka karena beberapa permohonan itu merupakan person, bukan lembaga Partai Politik, maka konsisten dengan sikap sebelumnya mestinya MK sudah bisa menolak, karena tidak mempunyai legal standing, karena peserta Pemilu sesuai ketentuan UUDNRI 1945 adalah Partai Politik, bukan person.

Selengkapnya kunjungi fraksidr.pks.id



Saya dan banyak pihak berharap agar dalam perkara permohonan perubahan sistem pemilu, MK melanjutkan konsisten dengan sikapnya yakni menolak permohonan untuk mengubah sistem pemilu terbuka kembali menjadi tertutup

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokratif Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



Hari Pers Nasional (HPN) diperingati tanggal 9 Februari setiap tahun, dimana tahun 2023 ini diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Sejarah panjang penetapan HPN ini tidak terlepas dari Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 1978 di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu butir keputusannya disepakati menetapkan satu hari bersejarah untuk memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional.

Keputusan kongres PWI ini dibawa ke sidang Dewan Pers di Bandung tanggal 19 Februari 1981, dan disetujui untuk disampaikan kepada Pemerintah sekaligus menetapkan Hari Pers Nasional.

Setelah itu, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, yang menetapkan HPN diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari. Hal ini didasarkan tanggal pembentukan PWI, 9 Februari 1946, yang pada masa orde baru satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah. Kemudian, Dewan Pers menetapkan HPN dilaksanakan secara bergantian di ibukota provinsi se-Indonesia.

HPN merupakan momentum penting bagi kita semua untuk menginspirasi peran pers dalam masyarakat dan mempromosikan

Catatan Hari Pers Nasional 2023

Pers sebagai Panduan Kehidupan Berdemokrasi

OLEH:
Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

pentingnya independensi. Diharapkan, pers bisa menjadi panduan dalam kehidupan berdemokrasi, terutama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak nanti.

Pers dan demokrasi memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Pers memainkan peran penting dalam membentuk opini publik serta memberikan informasi

yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang informatif dalam pemilu dan pembuatan kebijakan. Dengan memastikan publik memiliki akses informasi yang berimbang, pers membantu memperkuat demokrasi, dimana setiap individu memiliki hak yang sama memahami dan mempengaruhi proses politik.

Independensi pers sangat penting bagi publik dalam menerima informasi yang dapat dipercaya dan memperkuat demokrasi. Sehingga, pemerintah dan kekuatan politik lainnya tidak dapat mempengaruhi atau memanipulasi informasi yang diterima oleh publik.

Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah atau kekuatan politik dapat mencoba

untuk membatasi atau mempengaruhi pers untuk memanipulasi opini publik. Oleh karena itu, penting bagi publik dan pemangku kepentingan lainnya memperjuangkan hak pers dan memastikan pers tetap independen.

Untuk itu, HPN 2023 momentum bagi kita semua menjadikan pers yang independen sebagai panduan kehidupan berdemokrasi,



Catatan Hari Pers ... (2)

seperti sering disebut pers pilar keempat demokrasi. Pilar atau tiang ini harus kuat, kokoh dan independen, dalam menyangga demokrasi. Untuk memperkuat dan memperkokoh pilar tersebut, maka kita perlu meningkatkan kesadaran pentingnya kebebasan pers dan peranannya dalam masyarakat dan negara.

Kemudian, menghormati dan memperjuangkan hak-hak jurnalis/wartawan dan pers

untuk bekerja tanpa tekanan dan intimidasi. Selain itu, mendukung serta mempromosikan media independen dan pluralis, juga memastikan adanya akses yang luas bagi publik terhadap informasi. Selanjutnya, mendukung regulasi yang memastikan kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis/wartawan yang bekerja di lapangan. Serta, menghormati hak publik untuk

mengetahui dan memastikan informasi yang disampaikan pers itu akurat, objektif dan berimbang.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka Hari Pers Nasional 2023 akan memiliki makna yang sebenarnya sebagai pilar demokrasi, serta panduan dalam kehidupan berdemokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta ini.

Memperkuat persatuan bangsa

Pers memiliki peran memperkuat persatuan dan integrasi bangsa. Untuk itu, pers mesti menyediakan informasi yang akurat serta objektif tentang berbagai isu penting yang mempengaruhi persatuan dan integrasi bangsa. Akurat dan objektif bagian dari kode etik jurnalistik yang wajib diterapkan oleh setiap jurnalis atau wartawan dalam kerja jurnalistiknya.

Tidak hanya itu, pers juga harus memfasilitasi debat publik dan diskusi tentang hal-hal yang mempengaruhi persatuan dan integrasi bangsa, seperti isu budaya, politik, ekonomi, agama, ideologi, dan seterusnya.

Dalam memperkuat persatuan bangsa, pers juga harus memberikan platform



Independensi pers sangat penting bagi publik dalam menerima informasi yang dapat dipercaya dan memperkuat demokrasi. Sehingga, pemerintah dan kekuatan politik lainnya tidak dapat mempengaruhi atau memanipulasi informasi yang diterima oleh publik.

Image : Istimewa)

bagi suara-suara yang berbeda. Menghormati hak untuk berbicara serta berekspresi bagi semua warga negara, serta menyoroti praktik-praktik diskriminasi dan kebijakan yang merugikan persatuan dan integrasi bangsa. Pers mesti memainkan peran penting dalam membantu membangun dan memperkuat persatuan dan integrasi bangsa, serta

memastikan semua warga negara merasa diterima dan diakui.

Pers bersih dari berita hoaks

Dalam kehidupan berdemokrasi, pers harus bersih dan terjaga dari berita bohong, dipelintir atau hoaks. Mewujudkan pers yang bersih dan terhindar dari berita hoaks tersebut, maka perlu

Pers dan demokrasi memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Pers memainkan peran penting dalam membentuk opini publik serta memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang informatif dalam pemilu dan pembuatan kebijakan. Dengan memastikan publik memiliki akses informasi yang berimbang, pers membantu memperkuat demokrasi, dimana setiap individu memiliki hak yang sama memahami dan mempengaruhi proses politik.



Catatan Hari Pers ... (Tamat)

menerapkan standar jurnalistik yang ketat, memastikan sumber informasi yang digunakan benar-benar terpercaya. Melakukan cross-checking dan verifikasi informasi sangat penting sebelum

mempublikasikan berita.

Selain menghindari hoaks melalui sistem kerja redaksi dalam memproduksi berita, pers juga harus mendukung regulasi dan undang-undang yang memastikan transparansi

dan akuntabilitas dalam pemberitaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi acuan utama bagi jurnalis/wartawan dan perusahaan pers dalam bekerja. Kemudian, kode etik jurnalistik yang wajib diikuti dan dipatuhi oleh para jurnalis sebagai panduan profesi. Begitu juga dengan Undang-Undang dan regulasi lainnya yang bertujuan mengantisipasi penyebaran hoaks.

Media sosial dan tantangan bagi pers

Banjir informasi digital yang tak terbendung menjadi tantangan bagi pers saat ini. Sumber informasinya pun beragam, mulai dari portal berita, agregator berita, media sosial, serta tautan berita yang muncul dari mesin pencarian seperti Google. Dalam kondisi tersebut, masyarakat butuh panduan untuk memilih konten berkualitas sehingga bisa bersikap dengan benar. Di sini butuh peran pers sebagai pemandu kehidupan publik melalui produk jurnalistik bermutu dan bernilai.

Media sosial salah satu kanal informasi yang banyak diselami masyarakat. Berbagai informasi masuk ke kanal tersebut sehingga sulit

Pers harus memperhatikan tantangan-tantangan ini guna memastikan publik menerima informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan berimbang. Pers juga dapat bekerja sama dengan media sosial untuk memastikan algoritma dan pemilihan berita tidak mempengaruhi integritas berita tersebut. Dalam era digital yang berkembang pesat, pers harus terus berinovasi dan beradaptasi agar informasi yang diterima publik terjaga akurasi dan kebenarannya.

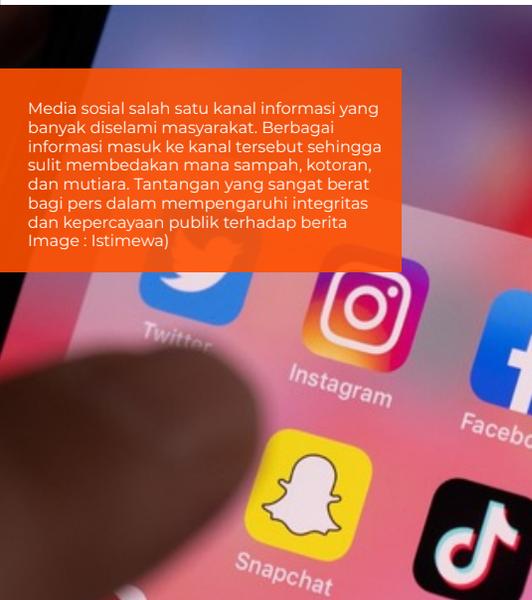
membedakan mana sampah, kotoran, dan mutiara. Tantangan yang sangat berat bagi pers dalam mempengaruhi integritas dan kepercayaan publik terhadap berita. Antara lain, berita bohong dimana media sosial memudahkan penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat mempengaruhi pandangan publik dan menyebar informasi yang salah. Tantangan lainnya, pemalsuan informasi karena media sosial memungkinkan untuk memalsukan informasi dan membuat berita palsu terlihat seperti sumber yang terpercaya.

Pers harus memperhatikan tantangan-tantangan ini guna memastikan publik menerima informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan berimbang. Pers

juga dapat bekerja sama dengan media sosial untuk memastikan algoritma dan pemilihan berita tidak mempengaruhi integritas berita tersebut. Dalam era digital yang berkembang pesat, pers harus terus berinovasi dan beradaptasi agar informasi yang diterima publik terjaga akurasi dan kebenarannya.

Memperingati HPN 2023, saya memberikan dukungan serta apresiasi yang tulus kepada para jurnalis/wartawan dan media pers. Saya mendorong pers untuk terus memainkan peran penting dalam masyarakat dan menjadi panduan kehidupan berdemokrasi. Selamat memperingati HPN 2023.

Media sosial salah satu kanal informasi yang banyak diselami masyarakat. Berbagai informasi masuk ke kanal tersebut sehingga sulit membedakan mana sampah, kotoran, dan mutiara. Tantangan yang sangat berat bagi pers dalam mempengaruhi integritas dan kepercayaan publik terhadap berita
Image : Istimewa)





**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***